

**ANALISIS HUBUNGAN DESENTRALISASI FISKAL
DENGAN BELANJA PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN KLATEN**

Tesis

**Untuk Memenuhi sebagian Persyaratan mencapai derajat Magister
Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan**

Konsentrasi:

Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan Daerah



Disusun Oleh:

**SUPRIYANTA
S4209113**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
SURAKARTA**

2011
commit to user

**ANALISIS HUBUNGAN DESENTRALISASI FISKAL
DENGAN BELANJA PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN KLATEN**

**Disusun Oleh:
SUPRIYANTA
S4209113**

Telah disetujui oleh Pembimbing

Pembimbing I



Dr. J.J. Sarungu, MS
NIP. 19510701 198010 1 001

Pembimbing II



Drs. Hari Murti, M.Si
NIP. 19561214 198403 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan



Dr. J.J. Sarungu, MS

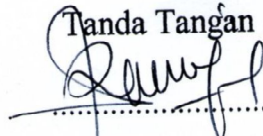
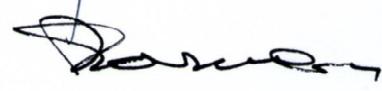

NIP. 19510701 198010 1 001

**ANALISIS HUBUNGAN DESENTRALISASI FISKAL
DENGAN BELANJA PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN KLATEN**

Disusun Oleh:

**SUPRIYANTA
S4209113**

Telah disetujui oleh Tim Penguji
Pada Tanggal 29 September 2011

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	: Dr. Evi Gravitiani, M.Si	
Pembimbing Utama	: Dr. JJ. Sarungu, MS	
Pembimbing Pendamping	: Drs. Hari Murti, M.Si	

Mengetahui
Direktur PPS UNS



Prof. Drs. Suranto, M.Sc., PhD
NIP. 19570820 198503 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi
Pembangunan

Dr. JJ Sarungu, MS
NIP 19510701 198010 1 001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriyanta

NIM : S4209113

Program Studi : Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, Agustus 2011

Tertanda,



(SUPRIYANTA)

PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan untuk:
Istri dan anak-anakku tersayang.*



commit to user

MOTTO

“Terima kasih untuk orang tua dibalas dengan kelakuan”

”Terima kasih untuk negara adalah sebuah pengabdian”

”Terima kasih untuk seorang istri diwujudkan dengan cinta dan kasih sayang”



commit to user

ABSTRAK

Kebijakan desentralisasi fiskal dipandang sebagai salah satu cara untuk pengambilan keputusan dalam meningkatkan pendapatan lewat dana transfer (dana perimbangan), lain-lain pendapatan, dan pendapatan asli daerah, serta pengurangan pengeluaran tidak terduga, untuk memperbaiki efisiensi sektor publik, memotong defisit anggaran, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan desentralisasi fiskal dengan Belanja Pembangunan daerah di Kabupaten Klaten, dan Perkembangan hubungan desentralisasi fiskal dengan Belanja Pembangunan daerah di Kabupaten Klaten selama tahun 2005-2009.

Tipe penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena dalam penelitian ini antara variabel bebas dan variabel terikat diukur dalam bentuk angka-angka. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi terkait yaitu Bappeda, BPS dan DPPKAD Kabupaten Klaten. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang kondisi keuangan daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan: 1) Analisis deskriptif; 2) Analisis Korelasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara dana perimbangan memiliki dengan belanja pembangunan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi *product moment* (r) yang diperoleh sebesar 0,968. (2) Terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara lain-lain penerimaan yang sah dengan belanja pembangunan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi *product moment* (r) yang diperoleh sebesar 0,837. (3) Terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara pendapatan asli daerah dengan belanja pembangunan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi *product moment* (r) yang diperoleh sebesar 0,886.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Belanja Pembangunan

ABSTRACT

Fiscal decentralization policy is seen as one way of decision making in improving revenues through transfers of funds (fund balance), other income and revenue, unexpected expenses and the reduction, to improve public sector efficiency, cut the budget deficit, and promoting economic growth.

This study aims to determine the relationship of fiscal decentralization with regional development spending in Klaten district, fiscal decentralization and the development of relations with Regional Development Expenditures in the Klaten district during the years 2005-2009.

This type of research is quantitative research, because in this study between independent variables and the dependent variable measured in terms of numbers. This type of data in this study are secondary data obtained from various relevant agencies ie Bappeda, BPS and DPPKAD Klaten district. Required data in this study are data on the financial condition of Klaten regency from 2005 until 2009. Data collection techniques performed by the method of documentation and observation. Techniques of data analysis done by: 1) descriptive analysis, 2) Correlation Analysis.

The results showed that: (1) There is a strong positive relationship between fund balance with development expenditure. This is indicated by the value of product moment correlation (r) obtained at 0,968. (2) There is a very strong positive relationships among others with a legitimate receipt of development spending. This is indicated by the value of product moment correlation (r) obtained at 0,837. (3) There is a strong positive relationship between local revenue to development expenditure. This is indicated by the value of product moment correlation (r) obtained at 0,886.

Keywords: Fiscal Decentralization, Development Expenditures

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: ANALISIS HUBUNGAN DESENTRALISASI FISKAL DENGAN BELANJA PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KLATEN.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menyelesaikan tesis ini tidak sedikit rintangan dan hambatan yang penulis hadapi, akan tetapi penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. J.J. Sarungu, M.S., selaku pembimbing I yang telah banyak memberi bimbingan dalam penelitian ini.
2. Drs. Hari Murti, M.Si, selaku pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dalam penelitian ini.

Pada kesempatan ini peneliti juga mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Yang terhormat Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta
4. Seluruh Dosen dan staf administrasi Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Rekan-rekan mahasiswa yang telah menaruh simpati dan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Istri tercinta, yang dengan do'a dan ketabahannya serta tulus ikhlas telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
7. Anak-anakku tersayang, yang selalu menumbuhkan rasa semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Semoga semua jasa yang telah mereka berikan kepada penulis akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Demi terwujudnya kesempurnaan tesis ini penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari pembaca, terima kasih.

Surakarta, Agustus 2011

commit to user

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis.....	14
1. Pemerintahan Lokal/Daerah.....	14
2. Keuangan Daerah di Era Otonomi	26
3. Hubungan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah.....	28
4. Desentralisasi Fiskal	32
5. Sumber-sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi	36
6. Belanja Pembangunan.....	48
B. Kajian Empiris	54
C. Kerangka Pikir	59
D. Hipotesis Penelitian.....	62

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Lokasi Penelitian	63
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian	63
C. Teknik Pengumpulan Data	64
D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	65
E. Teknik Analisis Data	66

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
1. Kondisi Geografis Kabupaten Klaten	69
2. Penggunaan Lahan	72
3. Kondisi Penduduk	74
4. Kondisi Pendidikan	77
5. Kondisi Ketenagakerjaan	79
6. Sarana Transportasi	80
7. Sarana Pengairan	82
8. Sarana Kesehatan	82
9. Kondisi Perekonomian	84
B. Analisis Data	98
1. Deskripsi Variabel Penelitian	98
2. Analisis <i>Korelasi Product Moment</i>	105
C. Pembahasan/Interpretasi Ekonomi	108

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	117
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

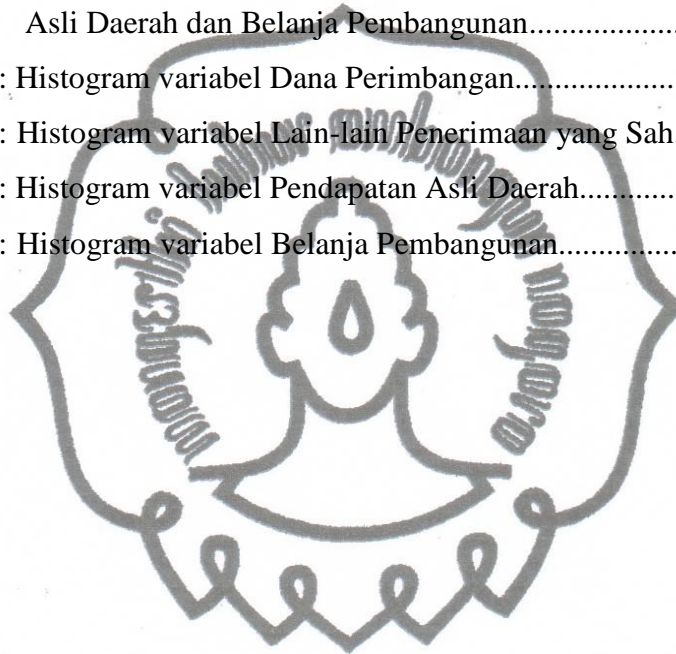
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 – 2009.....	10
Tabel 3.1 : Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi.....	68
Tabel 4.1 : Klasifikasi Topografi Wilayah Kabupaten Klaten.....	70
Tabel 4.2 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan, Tanah Sawah Dan Tanah Kering Di Kabupaten Klaten Tahun 2010 (Ha).....	73
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Klaten Tahun 2009 – 2010 ...	75
Tabel 4.4 : Kepadatan Penduduk Per Desa Dan Per Km ² Menurut Kecamatan Kabupaten Klaten Tahun 2010	76
Tabel 4.5 : Jumlah Sekolah Di kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2010.....	77
Tabel 4.6 : Jumlah Siswa Di Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2010	78
Tabel 4.7 : Pencari Kerja Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Klaten Tahun 2006 – 2010	79
Tabel 4.8 : Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi Dan Kelas Jalan Di Kabupaten Klaten Tahun 2010 (Km).....	80
Tabel 4.9 : Panjang Jalan Kabupaten Klaten Menurut Jenisnya 2010 (Km)	81
Tabel 4.10 : Rumah Sakit Menurut Jenisnya Kabupaten Klaten Tahun 2006 – 2010	83
Tabel 4.11 : Puskesmas Dan Posyandu Di Kabupaten Klaten Tahun 2006 - 2010.....	83
Tabel 4.12 : Dokter Praktek Yang Ijinnya Dikeluarkan Di Kabupaten Klaten Tahun 2009 – 2010	84
Tabel 4.13 : Bidan, Bidan Desa, Dokter Gigi dan Asisten Apoteker Di Kabupaten Klaten Tahun 2006 – 2010	84
Tabel 4.14 : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kecamatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Jutaan Rupiah)	85
Tabel 4.15 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 1993 Di Kab. Klaten Tahun 2008-2009 (Jutaan Rupiah)	86
Tabel 4.16 : Pertumbuhan Ekonomi Agregat Kabupaten Klaten 2005 – 2009.....	87
Tabel 4.17 : Laju Pertumbuhan PDRB Per Kecamatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008 – 2009 (%).....	88
Tabel 4.18 : Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Klaten 2007 – 2009.....	89
Tabel 4.19 : Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Menurut Kecamatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan.....	90
Tabel 4.20 : Kelompok Sentra Industri Dan Jumlah Unit Usaha Menurut Sektor Usaha Di Kabupaten Klaten Tahun 2010.....	93
Tabel 4.21 : Perusahaan Industri Dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha Di Kabupaten Klaten 2008 – 2010.....	94

Tabel 4.22 : Realisasi Penanaman Modal PMA/PMDN Kabupaten Klaten Tahun 2010	95
Tabel 4.23 : Jumlah Dana Perimbangan di Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2009.....	98
Tabel 4.24 : Statistik Deskriptif Variabel Dana Perimbangan di Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2009	99
Tabel 4.25 : Lain-lain Penerimaan yang Sah Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2009.....	100
Tabel 4.26 : Statistik Deskriptif Variabel Lain-lain Penerimaan yang Sah di Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2009	101
Tabel 4.27 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2009.....	102
Tabel 4.28 : Statistik Deskriptif Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2009	102
Tabel 4.29 : Belanja Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2009.....	104
Tabel 4.30 : Statistik Deskriptif Variabel Belanja Pembangunan di Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2009	104
Tabel 4.31 : Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi	106
Tabel 4.32 : Hasil Uji Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Pembangunan.....	106
Tabel 4.33 : Hasil Uji Hubungan Lain-lain Penerimaan yang Sah dengan Belanja Pembangunan.....	107
Tabel 4.34 : Hasil Uji Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Pembangunan.....	108

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Hubungan antara Desentralisasi Fiskal yang diproksikan dengan Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan.....	61
Gambar 4.1: Histogram variabel Dana Perimbangan.....	100
Gambar 4.2: Histogram variabel Lain-lain Penerimaan yang Sah.....	101
Gambar 4.3: Histogram variabel Pendapatan Asli Daerah.....	103
Gambar 4.4: Histogram variabel Belanja Pembangunan.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Usaha reformasi keuangan negara mencakup bidang; peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem akuntansi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut menjadi dasar bagi institusi Negara mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan (*financial management*).

Pengelolaan keuangan pemerintah merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka pembangunan bangsa dan negara (*nation and state building*). Adanya pengelolaan keuangan pemerintah yang baik akan menjamin

commit to user

tercapainya tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum. Langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan, dan penegakan sistem manajemen keuangan yang baik merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang semakin tak terelakkan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan.

Perhatian yang besar akan pentingnya pengelolaan keuangan pemerintah dilatarbelakangi oleh banyaknya tuntutan, kebutuhan atau aspirasi yang harus diakomodasi di satu sisi, dan terbatasnya sumberdaya keuangan pemerintah di sisi lain. Dengan demikian, pencapaian efektivitas dan efisiensi keuangan pemerintah semakin mengemuka untuk diperjuangkan. Upaya perwujudan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, terdapat pula tuntutan yang semakin besar untuk mengedepankan nilai-nilai tata kelola yang baik (*good governance*). Beberapa nilai yang relevan dan penting (*urgen*) untuk diperjuangkan adalah antara lain transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan, di samping nilai-nilai efektivitas dan efisiensi.

Indonesia hingga tahun 2000 dalam penelitian Tampubolon (2002) adalah, "*the world's most centralized large country*". Negara Indonesia merupakan salah satu negara paling sentralistik di dunia selama masa orde baru. Paradigma kekuasaan seperti ini telah menghasilkan sejumlah kesuksesan ekonomi tetapi juga korban sosial politik dan korban kemanusiaan serta krisis multidimensional yang berkepanjangan. Krisis multidimensi yang terjadi telah membuat kondisi perekonomian Indonesia terpuruk. Perubahan

yang cukup fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah di Indonesia terjadi sejak tanggal 1 Januari 2001 dikarenakan adanya krisis moneter dan transisi politik.

Perubahan tersebut terkait dengan dilaksanakannya otonomi daerah dengan penerapan konsep desentralisasi yang didasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Kedua Undang-undang dibidang otonomi daerah tersebut pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dan pemberian kewenangan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Perubahan kebijakan berdasarkan Undang-Undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang desentralisasi dan perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terjadi pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta implementasi kebijakan yang lebih fokus dan terarah sehingga meningkat efektifitas dan efisiensi kinerjanya.

Di Indonesia desentralisasi fiskal (DF) merupakan komponen utama dari program Otonomi Daerah yang dijalankan sejak awal th 2001. Pelaksanaan Otonomi Daerah dapat dipandang sebagai proses reformasi di bidang politik, kelembagaan dan sistem ekonomi. Di Indonesia hal ini diwujudkan dalam

bentuk pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999.

Penyelenggaraan otonomi daerah tersebut merupakan pelaksanaan azas desentralisasi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka diserahkan pula kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya.

Kewenangan otonomi daerah memerlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, serta keseimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka dalam Undang-Undang ini *commit to user* menitikberatkan otonomi pada Daerah Kabupaten

dan Kota yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat.

Kebijakan Desentralisasi Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan yang semakin luas kepada daerah untuk memberdayakan diri terutama berkaitan dengan pengelolaan potensi dan sumber pendanaan yang dimiliki. Sehingga diharapkan apabila pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Dengan Undang-Undang yang baru, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kebebasan dan keleluasaan yang lebih besar untuk melakukan terobosan-terobosan baru guna meningkatkan sumber pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Kebijakan desentralisasi fiskal dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dasar pemikirannya adalah dengan desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi, penggunaan dana APBD lebih tepat guna dan berdaya guna karena pemerintah kabupaten/ kota (daerah otonom) lebih mengetahui kondisi kebutuhan dan preferensi pembangunan daerah lokal.

Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah *money follow functions*, artinya penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, sehingga ada keseimbangan antara kewenangan/urusan

dan tanggung jawab yang diserahkan kepada daerah dengan sumber pendanaannya. Perimbangan keuangan dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.

Posisi keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan perencanaan keuangan daerah dan menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran daerah untuk membiayai semua kegiatan pembangunan dalam setiap tahun anggaran. Di era pasca reformasi, sejalan dengan perubahan peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yakni dengan diamandemennya UU No. 22/1999 dengan UU No. 32/2004, UU No. 25/1999 dengan UU No. 33/2004 yang diikuti dengan amandemen atas PP No. 105/2000 dengan PP No 58/2005 maka Kepmendagri No. 29/2002 juga diamandemen dengan Permendagri No. 13/2006, bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar. Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan langkah-langkah pementapan pelaksanaan otonomi daerah, yang dijabarkan dalam tiga fungsi utama, yaitu: 1) fungsi alokasi, yang meliputi antara lain sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, 2) fungsi distribusi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, 3) fungsi stabilisasi yang pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Realitasnya karakteristik daerah di Indonesia sangat beraneka ragam. Alasan itulah maka transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU masih diberikan khususnya untuk mengatasi kesenjangan antar daerah tersebut. Kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh DAU maka pemerintah memberikan bantuan transfer berupa Dana Alokasi Khusus (DAK).

Lain-lain Pendapatan adalah sumber pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat. Lain-lain Pendapatan bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Selain beberapa sumber pendapatan daerah tersebut, masih ada alternatif pembiayaan lainnya bagi daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah berupa pinjaman baik dalam bentuk kredit maupun penerbitan surat berharga (obligasi). Idealnya, pilihan terbaik untuk dapat mengurangi ketergantungan transfer dana dari pusat dengan upaya pemerintah daerah harus meningkatkan sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat diperlukan untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Dalam

rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, peranan Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber khususnya dari pajak daerah perlu untuk ditingkatkan lagi. Peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada masa mendatang sangatlah besar, sehingga perlu dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Keputusan peningkatan pendapatan lewat dana transfer (dana perimbangan), lain-lain pendapatan, dan pendapatan asli daerah, serta pengurangan pengeluaran tidak terduga dipandang sebagai salah satu cara untuk memperbaiki efisiensi sektor publik, memotong defisit anggaran, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Argumennya bahwa desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi, sebab pemerintah daerah dapat diposisikan secara lebih baik daripada pemerintah nasional (pusat) untuk memberikan layanan publik yang sesuai dengan preferensi (pilihan) dan kebutuhan daerah, dan pencapaian efisiensi akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi daerah dan juga nasional secara lebih cepat.

Pemerintah daerah dalam pembelanjaan dana transfer tersebut mengalokasikan dananya untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah melalui investasi daerah dan mengurangi belanja tidak terduga, maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika dana transfer tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, spekulatif,

dan konsumtif yang dapat menimbulkan *idle money* (berhentinya perputaran uang), maka akan berdampak kurang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perilaku fiskal (*fiscal behavior*) melalui penganggaran yang muncul sebagaimana uraian kedua (akuntabilitas dan partisipasi publik dalam perencanaan anggaran), kemungkinan mempunyai dampak tersendiri terhadap pertumbuhan.

Pembelanjaan pembangunan karena berdampak melalui multiplier, diasosiasikan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah. Pembelanjaan rutin yang cenderung tidak produktif dan menimbulkan *idle money* (berhentinya perputaran uang), diasosiasikan dengan efektifitas dan efisiensi pembangunan yang rendah. Kedua hal tersebut berakibat apakah desentralisasi fiskal berhubungan positif atau negatif terhadap pertumbuhan.

Pola pembelanjaan tersebut di atas, mempunyai asosiasi terhadap jenis pembelanjaan. Belanja rutin (*current expenditure*) diasosiasikan lebih kecil dampaknya terhadap penguatan ekonomi daerah karena dianggap tidak produktif dan cenderung konsumtif, dan mengarahkan inflasi di daerah membesar. Pembelanjaan pembangunan (*development expenditure*), melalui perencanaan yang matang berarti cenderung mengurangi belanja tidak terduga, diasosiasikan lebih bisa mempunyai dampak terhadap penguatan ekonomi daerah karena investasi di bidang pembangunan akan mempunyai multiplier yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdampak positif atau negatif, dan bagaimana pola hubungannya dapat dideteksi melalui ukuran-ukuran besaran yang muncul di APBD tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten merupakan susunan keadaan pengelolaan keuangan termasuk pengeluaran yang ada di sektor keuangan daerah. Pendapatan yang diterima Kabupaten Klaten mengalami kenaikan pada tiap tahunnya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2007 – 2009

No	APBD	Jumlah (Rp)			%	%
		2007	2008	2009	2008-2007	2008-2009
1	Pendapatan	489.525.543.000,-	521.146.782.000,-	756.631.775.000,-	11,7	51,7
2	Belanja	505.248.451.000,-	543.766.379.000,-	787.030.950.000,-	14,3	52,3

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, 2010.

Tabel 1.1. dapat dilihat bahwa pendapatan maupun belanja daerah di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Kondisi ini menandakan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Klaten mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan diimbangi dengan peningkatan pada sektor belanja daerah, bahkan jumlah belanja daerah lebih besar daripada pendapatan yang diterima. Naiknya anggaran tersebut menggambarkan kebutuhan Kabupaten Klaten yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi sebuah masalah bagi Kabupaten Klaten karena ketidakseimbangan jumlah pemasukan (pendapatan) dengan pengeluaran (belanja). Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Klaten akan mengalami defisit pada tahun-tahun yang akan datang.

Meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten, menuntut juga peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan, terdiri dari :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Permasalahannya sekarang adalah apakah perubahan kebijakan otonomi daerah yang diterapkan di Kabupaten Klaten selama ini sudah mempunyai dampak sesuai dengan yang diharapkan? Pertanyaan ini diajukan untuk menjawab dasar pemikiran dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana dengan desentralisasi fiskal akan dicapai efektifitas dan efisiensi pendanaan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi/cepat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Analisis Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Belanja Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan desentralisasi fiskal dengan Belanja Pembangunan daerah di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana perkembangan hubungan desentralisasi fiskal dengan Belanja Pembangunan daerah di Kabupaten Klaten selama tahun 2005-2009?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Hubungan desentralisasi fiskal dengan Belanja Pembangunan daerah di Kabupaten Klaten.
2. Perkembangan hubungan desentralisasi fiskal dengan Belanja Pembangunan daerah di Kabupaten Klaten selama tahun 2005-2009.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pembangunan daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
- b. Akademisi, sebagai bahan pembanding maupun menstimulir penelitian yang berhubungan dengan analisis hubungan desentralisasi fiskal dengan belanja pembangunan daerah.
- c. Masyarakat, sebagai masukan untuk memberikan kontrol terhadap pelaksanaan otonomi daerah sehingga desentralisasi fiskal membawa manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran di daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

E. Kajian Teoritis

1. Pemerintahan Lokal/Daerah

Dasar merupakan sesuatu yang vital dalam kehidupan manusia. Dasar itu pula menjadi landasan atau tempat pijakan bagi manusia untuk melakukan sesuatu. Demikian pula dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, perlu ada dasar, visi dan misi yang jelas sebagai landasan kebijakan yang mengatur pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pada tingkat ini dasar perlu dipahami sebagai pegangan hidup yang memotivasi atau mendorong masyarakat lokal untuk maju dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi maupun sosial budaya.

a. Dasar Pemerintahan Lokal

Landasan dasar pembentukan Pemerintahan lokal atau Daerah di Indonesia adalah UUD 1945, yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 18. Pasal 1 ayat 1 bunyinya: *‘Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik’*. Sedangkan pasal 18 menyatakan: *“Pembagian Daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan UU dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan sistem Pemerintahan negara dan hak-hak usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”*

Pasal 18 menetapkan:

- 1) *Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan propinsi akan dibagi pula dalam Daerah yang kecil.*
- 2) *Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan UU.*
- 3) *Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah (DPRD) oleh karena di Daerah pun Pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.*

Perwujudan ketentuan landasan Konstitusional tersebut, maka dalam sejarah perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, telah dihadirkan berbagai peraturan Perundangan yang berperan mengatur penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, antara lain:

- 1) UU No. 1 Tahun 1945
- 2) UU No. 22 Tahun 1948
- 3) UU No. 1 Tahun 1957
- 4) UU No. 18 Tahun 1965
- 5) UU No. 5 Tahun 1974

Kelima Peraturan Perundangan di atas dalam pelaksanaannya bersifat sentralistik, maka dalam menjawab tuntutan reformasi dikeluarkan UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang bersifat

desentralisasi, dimana Daerah diberikan Otonom untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerahnya.

b. Tujuan dan Visi Pemerintah Lokal Pada Era otonomi Daerah

Visi atau tujuan utama Pemerintahan lokal pada era otonomi daerah sudah tertuang dalam kebijakan desentralisasi tahun 1999, yakni:

1) Pembebasan pusat

Maksudnya adalah membebaskan Pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespons berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama sangat diharapkan Pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada kebijakan makro nasional dari yang bersifat strategis.

2) Pemberdayaan lokal atau daerah

Alokasi kewenangan Pemerintah pusat ke Daerah, maka Daerah akan mengalami proses '*pemberdayaan*' yang signifikan. Artinya, *ability* (kemampuan) prakarsa dan kreativitas Daerah akan terpacu sehingga kapasitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat.

3) Pengembalian kepercayaan (*trust*) pusat ke daerah

Desentralisasi merupakan simbol lahirnya *trust* dari pemerintah pusat kepada daerah. Hal ini dengan sendirinya akan

mengembalikan harga diri Pemerintah dan masyarakat Daerah. Sistem sentralistik Daerah tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah. Era otonomi ini, Daerah ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari berbagai masalah yang dihadapi. Pemerintah dan masyarakat di Daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mendominasi di Daerah. Peran Pemerintah pusat pada era desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah.

Visi dasar yang ingin dicapai desentralisasi pada era Otonomi Daerah ini adalah:

- 1) Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan Pemerintah dalam hubungan domestik kepada Daerah.
- 2) Penguatan peran rakyat dan DPRD dalam pemilihan dan penetapan Bupati. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan Bupati harus dipertegas. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi dan penyaluran aspirasi masyarakat harus dilakukan. Hak penyidikan DPRD perlu dihidupkan, hak prakarsa perlu diaktifkan dan bertanya perlu didorong. Dengan demikian produk legislasi akan dapat ditingkatkan dan pengawasan politik terhadap jalannya Pemerintahan bisa diwujudkan.

commit to user

- 3) Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur lokal demi menjamin kepemimpinan Pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.
- 4) Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Maka perlu dibangun suatu sistem administrasi dan pola karir kepegawaian daerah yang lebih sehat dan kompetitif.
- 5) Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian pendapatan dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah.
- 6) Perwujudan desentralisasi fisik melalui pembesaran alokasi subsidi dari Pemerintah pusat yang bersifat *block grant*, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada Daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada.
- 7) Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat konduktif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa. Untuk menyukkseskan semua

perencanaan tersebut maka diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari Pemerintah pusat. Daerah diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin pemerintahan yang demokratis serta DPRD yang mampu menjembatani antara tuntutan rakyat dengan kemampuan pemerintah. Juga organisasi masyarakat yang mampu memobilisasi dukungan terhadap kebijakan yang pro masyarakat luas. Misalnya kebijakan ekonomi yang berpihak pada pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

c. Prinsip-prinsip Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan rakyatnya untuk menyukseskan pembangunan Daerah dan Nasional. Lima prinsip di dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, terdiri dari:

- 1) Prinsip kesatuan, yakni pelaksanaan pemberian Otonomi Daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.
- 2) Prinsip riil dan tanggungjawab, yakni pemberian Otonomi kepada Daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab bagi kepentingan seluruh warga Daerah. Pemerintah Daerah berperan mengatur proses dinamika Pemerintahan dan pembangunan di daerah.

- 3) Prinsip pemencaran, yakni asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif membangun Daerahnya. Artinya, Pemerintah bukan sebagai raja, melainkan pelayan untuk dan bersama rakyat membangun Daerahnya.
- 4) Prinsip keserasian, yakni pemberian otonomi kepada Daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian.
- 5) Prinsip pemberdayaan, yakni tujuan pemberian Otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, terutama dalam aspek pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

d. Syarat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

The Liang Gie (1994 : 244) dalam bukunya berjudul *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia* (Jilid II) mengisyaratkan bahwa syarat-syarat bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dipahami dan diterima oleh semua orang adalah:

- a. Stabil. Artinya para penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak terlalu mudah untuk ditumbangkan atau disuap, digiring dan diiming-iming sehingga mempunyai kesempatan untuk bekerja

commit to user

dengan tenang. Juga mempunyai kesatuan yang kompak sehingga dapat mewujudkan suatu tim kerja yang dipimpin dan berdisiplin.

- b. Mencerminkan kehendak rakyat. Tolok ukurnya dilihat dari misi dan cara kerjanya aparat Pemerintahan Daerah. Berarti Badan-badan Pemerintahan Daerah harus terdiri dari orang-orang yang benar-benar mewakili rakyat sehingga segenap tindakannya adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat.
- c. Revolusioner. Artinya Pemerintah Daerah mampu berpikir dan bertindak dinamis serta berani meninggalkan tradisi lama dan menggantikan dengan yang baru yang bersifat membangun bagi kepentingan rakyat banyak.
- d. Gotong royong. Artinya Pemerintah Daerah harus mampu bekerjasama dengan semua warga masyarakat Lokal serta bersama-sama membangun Daerahnya.
- e. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pemerintah pusat hanya memegang kewenangan di bidang: (1) Keuangan dan moneter, (2) Politik luar negeri, (3) Peradilan, (4) Pertahanan dan keamanan, (5) Agama dan kewenangan di bidang lain. Kewenangan lain ini adalah: (1) Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, (2) Dana perimbangan keuangan, (3) Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, (4) Pembinaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, (5) Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan pemberdayaan Sumber Daya Strategis, (6) Konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom meliputi bidang: Pertanian, Kelautan, Pertambangan dan Energi, Kehutanan dan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan, Perkoperasian, Penanaman Modal, Kepariwisata, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan Nasional, Sosial, Penataan Ruang, Pertanahan, Pemukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik, Pengembangan Otonomi Daerah, Perimbangan Keuangan Daerah, Kependudukan, Olah Raga, Hukum dan Perundang-undangan, dan Penerangan.

Kewenangan kabupaten atau Kotamadya pada dasarnya sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Propinsi. Tetapi yang pasti Kabupaten atau Kotamadya melaksanakan ada 11 kewenangan, yaitu:

- 1) Pekerjaan Umum
- 2) Kesehatan
- 3) Pendidikan dan Kebudayaan
- 4) Pertanian
- 5) Perhubungan
- 6) Perindustrian dan Perdagangan
- 7) Penanaman Modal
- 8) Lingkungan Hidup
- 9) Pertanahan

10) Koperasi

11) Tenaga Kerja

Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya dapat melaksanakan kewenangan lain yang dianggap diperlukan masyarakatnya serta mampu dilaksanakan dengan baik. Sebagai contoh adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya dalam bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi:

- 1) Penetapan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi.
- 2) Penetapan standar nasional barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan.
- 3) Pengaturan persaingan usaha.
- 4) Penetapan pedoman perlindungan konsumen.
- 5) Pengaturan lalulintas barang dan jasa luar negeri.
- 6) Pengaturan kawasan berikan.
- 7) Pengelolaan kemetrolagian.
- 8) Penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.
- 9) Penetapan pedoman pengembangan sistem pergudangan.
- 10) Fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.

f. Tugas pemerintah Daerah

Tugas mulia yang perlu dikembangkan oleh Pemerintah Daerah adalah:

commit to user

- i. Memfasilitasi segala bentuk kegiatan di Daerah, terutama dalam bidang ekonomi, politik serta sosial dan budaya. Dalam bidang perekonomian misalnya, segala bentuk perizinan dipermudah, bukan sebaliknya dengan menciptakan segala bentuk birokrasi yang menyulitkan kalangan pengusaha dan investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Logika yang hendak digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah silahkan menggunakan sarana dan prasarana serta sumber daya Daerah untuk kegiatan ekonomi Daerah. Dengan demikian menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Juga Daerah perlu menawarkan fasilitas perpajakan yang merangsang penanaman modal. Sebaliknya, kalau Pemerintah Daerah memiliki kecenderungan untuk memungut, maka cepat atau lambat penanam modal akan mencari tempat lain. Dalam bidang politik, Pemerintah Daerah harus mampu membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan Daerah, membangun sistem dan pola karier politik dan administrasi yang kompetitif serta mengembangkan sistem manajemen Pemerintahan yang efektif. Sedangkan dalam bidang sosial dan budaya, Pemerintah Daerah harus mampu mengelola Daerah sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai Lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespons dinamika kehidupan di sekitarnya.

- ii. Menumbuhkan inisiatif dan kreativitas Lokal. Pembangunan yang berbasis inisiatif dan kreativitas sangat mengandaikan kemampuan Pimpinan Daerah untuk mengaturnya serta mendorong inisiatif dan kreativitas masyarakat. Tujuannya untuk mempercepat dan meningkatkan pembangunan. Artinya, kemampuan Pimpinan Daerah untuk mengelola segala potensi atau modal sosial yang ada di Daerahnya. Misalnya, kreativitas Pemerintah dalam mengalokasikan dana, apakah yang bersumber dari DAU ataukah dari PAD secara tepat dan adil serta proporsional. Seperti berapa untuk gaji, biaya operasional, sarana sosial, sarana dan prasarana fisik dan lain-lain. Kreativitas juga menyangkut kapasitas untuk menciptakan keunggulan komparatif bagi Daerahnya sehingga kalangan pemilik modal akan beramai-ramai menanamkan modal di Daerah tersebut. Atau kreativitas menyangkut kemampuan untuk menarik DAK dari Pemerintah pusat sehingga banyak dana dari Jakarta mengalir ke Daerahnya. Tentu saja Pemerintah Lokal harus mampu menyiapkan program-program sosial, ekonomi yang menarik sehingga Pemerintah tidak ragu memberikan dukungannya. Singkatnya, Pemerintah Daerah harus pandai-pandai membuat proyek agar uang dapat mengalir dari pusat ke Daerah.
- iii. Menciptakan suasana kondusif (stabil). Masyarakat dan pemerintah di Daerah harus menciptakan suasana politik lokal yang kondusif bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi. Sebab orang tidak

akan mau menanamkan modalnya di suatu Daerah dengan situasi politik yang tidak stabil. Atau Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja dengan baik kalau suasana tidak kondusif.

- iv. Menjamin kesinambungan berusaha. Sebab ada kecenderungan yang mengkhawatirkan berbagai pihak bahwa Pemerintah Daerah seringkali merusak tatanan yang sudah ada. Apa yang sudah disepakati sebelumnya, baik melalui kontrak dalam negeri atau dengan pihak asing seringkali diancam untuk ditinjau kembali, bahkan hendak dinafikan oleh Pemerintah Daerah yang baru dengan alasan Otonomi Daerah.
- v. Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga luar, seperti LSM, Perguruan Tinggi (PT), Tokoh Agama (Toga), Tokoh Adat (Todat), dan Tokoh Masyarakat (Tomas). Hal ini penting demi kepentingan Daerah. Karena itu pemerintah Daerah berperan sebagai jembatan yang menjembatani antara kepentingan dunia usaha dengan aspirasi masyarakat. Dengan demikian sikap-sikap radikal dari kalangan masyarakat atau buruh yang didukung oleh LSM, PT, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat akan dapat terjembatani (Jimung, 2005 : 75 – 93).

2. Keuangan Daerah di Era Otonomi

Keuangan adalah rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan (baik penerimaan maupun pembiayaan) secara tertib, sah, hemat, *commit to user*

berdaya guna dan berhasil guna (Mamesah, 1995 : 16). Lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan. Pengelolaan atas penerimaan daerah meliputi penganggaran atau penetapan target hendaknya dikaitkan dengan potensi-potensi yang nyata dan dapat direalisasikan sehingga dapat diharapkan menjadi modal, untuk segala pembiayaan. Demikian juga pengelolaan atas anggaran belanja itu sendiri hendaknya direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan pada akhirnya dapat diterima pertanggungjawabannya. Sedang pertanggungjawaban itu harus mendapat persetujuan legislatif dan dari pejabat yang berwenang untuk itu. Hal-hal tersebut di atas dapat tercakup dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk perhitungannya yang dibuat dan dilaksanakan setiap tahun anggaran. Di samping itu barang milik Daerah sebagai inventaris kekayaan milik Daerah, baik yang merupakan hasil-hasil pengadaan tahun yang lalu, hibah dan lain-lain hendaknya dikelola dengan baik, baik tata usahanya, pemeliharaannya, ataupun penyimpanannya serta status hukum pemilikannya sehingga dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna. Barang-barang inventaris tersebut dapat diklasifikasikan sebagai barang tidak

bergerak seperti tanah (pertanian, perkebunan, jalan-jalan, jembatan, waduk, bangunan irigasi, lapangan olah raga dan lain-lain), bangunan gedung (kantor, gudang, pabrik, sekolah, rumah sakit, rumah tempat tinggal, asrama/mess), monumen dan lain-lain serta barang bergerak antara lain alat-alat berat (seperti bulldoser, traktor, dan lain-lain), peralatan pabrik, bengkel, laboratorium, dan lain-lain, peralatan kantor dan perpustakaan, alat-alat pengangkutan udara, laut, darat dan lain-lain.

- b. Kekayaan milik Daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan ke dalam APBD tetapi diselenggarakan oleh organisasi Daerah yang didirikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang juga berfungsi sebagai kas daerah yang didirikan berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962 tentang pokok-pokok Bank Pembangunan Daerah.

3. Hubungan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Adriansyah (2003: 20) mengemukakan bahwa di dalam Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur tentang sumber-sumber penerimaan Daerah yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah,
- b. Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil SDA dan Non SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),

- c. Pinjaman Daerah,
- d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (*vertical imbalances*) serta kesenjangan antar daerah (*horizontal imbalances*) (Sidik, 2005: 42).

Berpegang pada asas Negara Kesatuan tersebut maka antara keuangan negara dan keuangan daerah terdapat hubungan yang erat sekali dimana bukan saja bersifat hubungan keuangan antara tingkat pemerintah akan tetapi mencakup pula faktor-faktor strategis pembangunan dan pengawasan terhadap daerah. Oleh karena itu pandangan terhadap hubungan ini dapat dilihat dari tiga aspek/sudut pandang, yaitu:

- a. Aspek penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan pada prinsip-prinsip pemberian otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dimana di dalam pelaksanaannya dilakukan bersama-sama antara asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan asas tugas pembantuan.

Berdasarkan prinsip dan asas-asas tersebut maka daerah-daerah tidak hanya melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, akan tetapi melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah kekuasaannya.

Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang cukup berat serta semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat sebagai hasil pembangunan, maka daerah-daerah dihadapkan kepada

kebutuhan sumber-sumber keuangan dimana ternyata sumber-sumber keuangan daerah tersebut masih sangat terbatas.

Keterbatasan sumber keuangan daerah tersebut, maka pemerintah melalui APBN menyalurkan berbagai sumber dana, seperti:

- 1) Sumbangan-sumbangan berupa dana ganjaran serta subsidi/perimbangan keuangan negara.
 - 2) Bantuan pembangunan
- b. Aspek pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan.

Aspek ini menegaskan bahwa kebijaksanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berdasarkan kepada Trilogi Pembangunan, yaitu:

- 1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- 3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Keserasian dan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, perlu dilanjutkan bahkan lebih ditingkatkan.

- c. Aspek pengawasan.

Pengawasan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas umum pemerintah dengan daerah-daerah serta untuk lebih menjamin

kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sesuai dengan penjelasan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pengesahan APBD, Pengesahan Peraturan-peraturan Daerah yang berkaitan dengan PAD (baik berupa pajak dan retribusi daerah) maupun pengesahan atas perhitungan APBD, merupakan suatu wujud yang nyata dari pengawasan ini, dimana untuk Provinsi disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan untuk Kabupaten dan Kotamadya disahkan oleh Gubernur.

Pengawasan atas pelaksanaan anggaran daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri. Kondisi ini menunjukkan hubungan yang erat antara keuangan negara dan keuangan daerah.

Hubungan keuangan negara tercermin pula dalam pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.
- 2) Harus dapat menjalin hubungan yang serasi antara pemerintah dengan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan.
- 3) Harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah

(Mamesah, 1995 : 21 – 27)

Posisi keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan perencanaan

keuangan daerah dan menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran daerah untuk membiayai semua kegiatan pembangunan dalam setiap tahun anggaran. Di era pasca reformasi, sejalan dengan perubahan peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yakni dengan diamandemennya UU No. 22/1999 dengan UU No. 32/2004, UU No. 25/1999 dengan UU No. 33/2004 yang diikuti dengan amandemen atas PP No. 105/2000 dengan PP No. 58/2005 maka Kepmendagri No. 29/2002 juga diamandemen dengan Permendagri No. 13/2006, bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar. Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Untuk itu dalam bentuk yang baru APBD terdiri atas tiga bagian yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan.

4. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hoessein, 2002: 12). Ini berarti kekuasaan yang sebelumnya secara penuh berada di pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota. Penyerahan kewenangan ini kemudian disertai penyerahan sumber-sumber pembiayaan (*money follows function*). Meskipun demikian ternyata ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalances*) masih juga muncul terutama terjadi antara daerah yang dianugrahi sumber daya alam yang

besar dengan daerah yang memang miskin sumber daya alam. Karenanya pemerintah pusat masih tetap memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang besarnya sekurang-kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN.

Desentralisasi fiskal adalah merupakan perubahan-perubahan penting yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sementara itu kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalances*) seperti masa pemerintahan Orde Baru juga hendak dihilangkan melalui mekanisme alokasi Dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang besarnya telah ditetapkan oleh UU. Untuk kebutuhan khusus yang tidak dapat dicukupi dengan DAU misalnya bencana alam, dana darurat maka pemerintah pusat masih memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK).

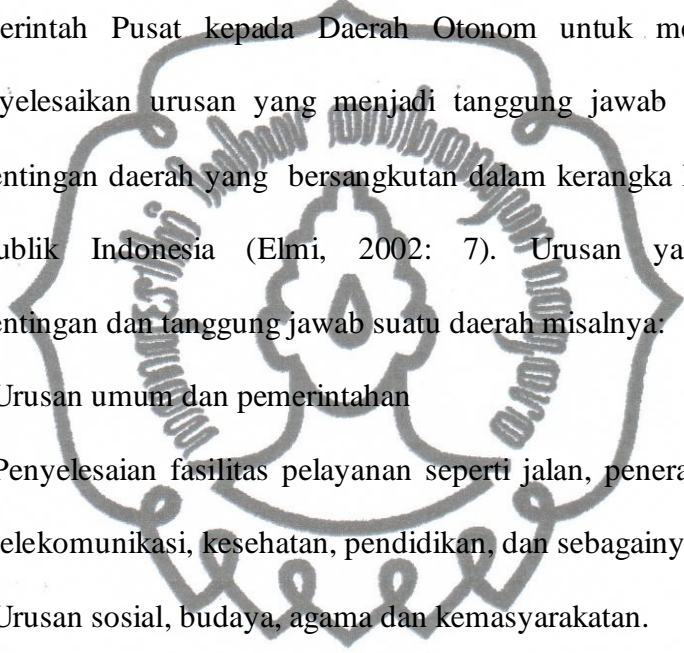
Desentralisasi selain mengandung banyak manfaat ternyata juga menyimpan banyak permasalahan terutama yang terkait dengan pemisahan suatu daerah untuk menjadi daerah baru sehingga dimensi spasial menjadi makin kecil (Ismail, 2002: 25). Karenanya desentralisasi juga dapat menghasilkan suatu dampak berupa eksternalitas yang makin besar sehingga berkesan penyediaan barang publik yang *under provided*.

Pemerintah Negara merupakan suatu sistem. Sistem itu menyelenggarakan berbagai kegiatan melalui subsistem sosialnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat negara. Sementara itu sistem pemerintahan selaku penyelenggara negara tergantung kepada kehendak

commit to user

mayoritas rakyat. Di masa sekarang, apabila diperhatikan akan tampak bahwa masyarakat di negara manapun tidak menginginkan pemerintahan yang sentralistis dan otoriter.

Pengertian desentralisasi menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Elmi, 2002: 7). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab suatu daerah misalnya:

- 
- a. Urusan umum dan pemerintahan
 - b. Penyelesaian fasilitas pelayanan seperti jalan, penerangan, air bersih, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
 - c. Urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan.

Desentralisasi dibutuhkan oleh negara yang memiliki wilayah yang luas karena:

- a. Untuk menghindari menumpuknya berbagai masalah di daerah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian maka tidak akan terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan mana yang harus diambil terlebih dahulu. Dengan demikian daerah tidak lagi menunggu-nunggu kapan masalahnya akan teratasi. Penyelesaian suatu pekerjaan pembangunan secara ekonomis menjadi lebih efisien dalam perencanaan dan pelaksanaannya karena

dilakukan oleh masyarakat daerah yang lebih mengerti keinginan dan spesifikasi daerah (*locus solus*) tertentu.

- b. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah dan dana pembangunan bergulir ke wilayahnya.
- c. Masyarakat dan lembaga legislatif daerah akan lebih berpartisipasi dan menjadi instrumen pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Ada 4 hal yang harus dipenuhi oleh asas desentralisasi, yaitu:

- a. Keleluasaan otonomi artinya mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
- b. Otonomi yang nyata artinya daerah punya keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada, dibutuhkan tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.
- c. Otonomi yang bertanggung jawab, berarti sebagai konsekuensi logis dari pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam pemberian pelayanan kepada publik dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya.

- d. Otonomi untuk daerah propinsi diberikan secara terbatas yaitu: (1) Kewenangan lintas kabupaten/kota; (2) Kewenangan belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota; (3) Kewenangan lainnya menurut PP No. 25 tahun 2000 (Elmi, 2002 : 13).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan desentralisasi fiskal adalah adanya pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

5. Sumber-sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004: 213). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yani, 2002: 39).

Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya. *commit to user*

Pendapatan Asli Daerah meliputi:

i. Pajak daerah

Pengertian pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya: pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan lain-lain (Suparmoko, 1999: 94). Menurut Rochmat Soemitro, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Suandy, 2002: 10).

Pajak daerah dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri,
- b) Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
- c) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah,
- d) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah (Davey, 1988: 39).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandy, 2002: 258).

ii. Retribusi daerah

Sumber pendapatan asli daerah yang kedua adalah retribusi daerah. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya: uang langganan air minum, uang langganan listrik (Suparmoko, 1999: 94).

Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang diselesaikan oleh pemerintahan daerah (Suandy, 2002: 258). Yani (2002: 55) mengemukakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

iii. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah (Wijaya, 2002: 110).

iv. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- i. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- ii. jasa giro
- iii. pendapatan bunga
- iv. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- v. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan/atau jasa oleh Daerah. (UU No. 33 Tahun 2004: 217)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak dan retribusi Daerah serta hasil usaha Daerah sendiri. Sedangkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Pajak Daerah Kabupaten/Kota menurut UU No. 34 tahun 2000 terdiri dari:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir.

commit to user

Pajak Daerah di atas dapat ditetapkan Pajak Daerah lainnya melalui Peraturan Daerah dengan memenuhi kriteria tertentu, antara lain:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak berada dalam wilayah Kabupaten/Kota
- c. Dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Bukan merupakan objek Pajak Propinsi atau Pajak Pusat
- e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- f. Memperhatikan aspek keadilan
- g. Menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi daerah dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu (UU No. 34 tahun 2000)

Jenis-jenis ketiga golongan retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut juga dapat ditetapkan Retribusi daerah lainnya dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

b. Dana Perimbangan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Dana perimbangan terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil

Syarifin dan Jubaedah (2005:108) mengemukakan “Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : “1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”.

Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari “1) kehutanan, 2) pertambangan umum, 3) perikanan, 4) pertambangan

minyak bumi, 5) pertambangan gas bumi, 6) pertambangan panas bumi”.

Proporsi Dana Bagi Hasil menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah meliputi 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan 9% untuk biaya pemungutan.

Sepuluh persen (10%) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbalan sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota, dan sebesar 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah Kabupaten dan Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan rincian 16% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan

64% untuk daerah Kabupaten dan Kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTP dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk Provinsi.

d. Kehutanan

Penerimaan dari sektor Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbang 20% untuk Pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbang sebesar 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk daerah.

e. Pertambangan Umum

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbang 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.

f. Perikanan

Dana Bagi Hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

g. Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dengan imbalan 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% dibagi dengan imbalan 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

h. Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbang 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah. Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah sebesar 30% dibagi dengan imbang 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota dalam provinsi bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

i. Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbang 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi hasil dari penerimaan

pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan imbang 16% untuk Provinsi yang bersangkutan, 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

2) Dana Alokasi Umum

Syarifin dan Jubaedah (2005:108) mengemukakan “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Wijaya (2007: 123) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang.

Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

3) Dana Alokasi Khusus

Syarifin dan Jubaedah (2005:107) mengemukakan “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah:

- a. Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.
- b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- c. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

d. Lain-lain Penerimaan yang sah

Lain-lain Penerimaan yang sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan terdiri dari dana hibah dan dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan desentralisasi fiskal adalah adanya pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik dalam sisi anggaran maupun penerimaan dan pengeluaran, meliputi: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan.

6. Belanja Pembangunan

Pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban serta tugas yang dibebankan oleh rakyat. Realisasi kewajiban Negara akan menyebabkan timbulnya pengeluaran-pengeluaran

commit to user

Negara atau disebut juga belanja Negara. Belanja Negara ini sebelumnya telah dinyatakan dalam bentuk angka-angka pada anggaran belanja Negara yang merupakan pengeluaran tertinggi bagi pembiayaan suatu pelaksana kegiatan.

Ichwan (1997: 27) mendefinisikan belanja pembangunan sebagai berikut: “Belanja Pembangunan adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang non konsumtif, berbentuk investasi (proyek-proyek) baik berbentuk proyek fisik maupun non fisik”. Baswir (1997 : 45) mengemukakan “Belanja Pembangunan adalah: sebagai pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi, dan diajukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sebagai salah satu pelaku pembangunan”.

“Belanja Pembangunan adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang non konsumtif, berbentuk investasi dalam proyek-proyek, baik dalam bentuk proyek fisik seperti pembangunan bendungan air maupun non fisik seperti proyek-proyek dalam pengembangan pendidikan, keagamaan dan sebagainya. Pelaksanaan belanja pembangunan dirinci ke dalam sektor-sektor, tiap-tiap sektor dibagi ke dalam subsektor, masing-masing subsektor dirinci ke dalam program proyek, dan akhirnya untuk masing-masing proyek dirinci lagi ke dalam bagian anggaran” (Hasan, 1994: 235).

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja pembangunan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Belanja Pembangunan adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang non konsumtif, berbentuk investasi dalam proyek-proyek, baik dalam bentuk proyek fisik seperti pembangunan bendungan air maupun non fisik seperti proyek-proyek dalam pengembangan pendidikan, keagamaan dan sebagainya. Pelaksanaan belanja pembangunan dirinci ke dalam sektor-sektor, tiap-tiap sektor dibagi ke dalam subsektor, masing-masing subsektor dirinci ke dalam program proyek, dan akhirnya untuk masing-masing proyek dirinci lagi ke dalam bagian anggaran.

Pengeluaran pembangunan merupakan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan, yaitu untuk meningkatkan kemakmuran secara merata dan serasi antar daerah dan antar golongan, dilaksanakan melalui upaya bidang ekonomi. Prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara lebih luas dan intensif. Kriteria ini sekaligus berarti perluasan lapangan dan kesempatan kerja (Anwar, 1986: 69).

Belanja Pembangunan meliputi belanja pembangunan dalam bentuk rupiah dan belanja pembangunan dalam bentuk bantuan proyek

yang dibiayai dari pinjaman atau hibah luar negeri. Belanja pembangunan dalam bentuk rupiah bersumber dari tabungan pemerintah dan bantuan program yang digunakan untuk membiayai belanja-belanja sektoral melalui departemen atau lembaga non departemen dan dialokasikan pula untuk membiayai proyek-proyek.

Obyek pembiayaan belanja pembangunan terdiri atas dua jenis pengeluaran yaitu belanja penunjang dan belanja modal.

i. Belanja penunjang

Belanja penunjang adalah belanja kegiatan proyek yang menunjang operasional kegiatan pokok proyek, yang terdiri dari:

1. Belanja penunjang gaji upah; yang mencakup honorarium, lembur, uang saku, uang lelah dan upah.
2. Belanja penunjang bahan; yang mencakup biaya pengadaan bahan-bahan habis pakai yang perlukan untuk penunjang proyek.
3. Belanja penunjang perjalanan; yang mencakup biaya perjalanan dinas petugas/pegawai proyek yang ditugaskan dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek, termasuk perjalanan lokal.
4. Belanja penunjang lain-lain; yang mencakup biaya yang diperlukan untuk belanja penunjang yang tidak dapat dikategorikan kedalam belanja gaji upah, bahan dan perjalanan.

Belanja tersebut termasuk kegiatan yang hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan dalam periode berjalan, misalnya langganan listrik,

air, telepon, teleks, akomodasi/konsumsi, pemeliharaan kendaraan operasional kantor dan peralatan kantor proyek sepanjang tidak belum ditampung dalam DIK anggaran rutin.

ii. Belanja Modal

Belanja Modal adalah biaya untuk kegiatan proyek yang diperkirakan akan memberi manfaat bagi periode sekarang dan periode yang akan datang, yang terdiri dari :

1. Belanja modal tanah

Mencakup biaya pengadaan/ pembelian tanah, pengosongan, perataan, pematangan dan pembuatan sertifikat tanah serta biaya-biaya administratif lainnya yang berkaitan.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Mencakup pengadaan alat-alat dan mesin-mesin yang dipergunakan dalam pelaksanaan proyek (termasuk keperluan untuk pekerjaan yang dikontrakkan, tetapi peralatan/mesin yang disediakan proyek). Dalam belanja tersebut termasuk biaya untuk penambahan, penggantian, peningkatan serta perawatan peralatan/mesin yang merupakan kegiatan pokok proyek dan diharapkan dapat memperpanjang masa manfaat/meningkatkan efisiensi.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Mencakup biaya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gedung/bangunan untuk berbagai keperluan,

commit to user

termasuk bangunan yang merupakan induk/simpul pertama dari suatu jaringan misalnya bangunan pembangkit listrik dan stasiun/sentral telekomunikasi. Dalam belanja ini termasuk belanja untuk kelengkapan prasarana dan sarana didalam/sekitar gedung dan bangunan.

4. Belanja modal jaringan (jalan, irigasi dan lain-lain)

Mencakup penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan prasarana dan sarana yang berfungsi atau yang mencakup penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan prasarana dan sarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan misalnya jalan, jembatan, jaringan pengairan, jaringan listrik dan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi/instalasi.

5. Belanja modal fisik

Mencakup biaya pengadaan/pembangunan fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jaringan, misalnya kontrak sewa beli, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, barang-barang untuk museum, hewan, buku-buku serta jurnal ilmiah.

6. Belanja modal non fisik

Mencakup biaya untuk kegiatan proyek yang hasilnya bersifat non fisik yang bermanfaat pada periode sekarang dan periode yang

commit to user

akan datang, misalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/keterampilan, penataran, kursus, penyuluhan analisis/penyelidikan dan belanja modal non fisik lainnya yang berhubungan dengan kegiatan/sasaran pokok proyek yang hendak dicapai.

Belanja pembangunan adalah belanja pembangunan yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Indikator belanja pembangunan adalah belanja penunjang dan belanja modal yang diprogramkan dalam setiap sektor maupun subsektor.

F. Kajian Empiris

Sesuai dengan semangat otonomi daerah, pembiayaan pembangunan yang bersumber dari daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama bagi percepatan pembangunan. Pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan daerah yang dapat memaksimalkan pembangunan di daerahnya serta sekaligus mensinkronisasikan pembangunan tersebut untuk percepatan pembangunan. Selayaknya pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan sumber daya sendiri dan dapat mengurangi ketergantungan dari Pusat (Bahl, 1999; *World Bank*, 2003). Akan tetapi, beberapa studi empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah telah menimbulkan distorsi pasar dan *high cost economy* (Saad, 2003) dalam penelitian Landiyanto (2005). Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan

penerimaan daerah kurang diikuti upaya untuk meningkatkan pelayanan publik (Abdullah dan Halim, 2004).

Desentralisasi dalam bidang fiskal (keuangan) merupakan komponen utama dari kebijakan desentralisasi itu sendiri. Untuk dapat menjalankan desentralisasi fiskal secara efektif, pemerintah daerah otonom harus memiliki penerimaan yang besar agar dapat menjalankan fungsi desentralisasi yang diberikan kepada daerahnya (Litvack dan Seddon, 2002). Dalam Litvack dan Seddon (2002) menyebutkan ada empat bentuk desentralisasi fiskal, yaitu : (1) *Self financing*, yaitu berusaha meningkatkan penerimaan dengan menaikkan PAD melalui kenaikan retribusi; (2) *Expansion of local revenues*, yaitu peningkatan penerimaan daerah melalui peningkatan pajak; (3) *Intergovernmental transfer*, yaitu peningkatan penerimaan daerah melalui bantuan pemerintah untuk program yang umum maupun khusus (DAU dan DAK); dan (4) memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menutup pengeluaran daerah melalui hutang dalam negeri maupun hutang luar negeri.

Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar otonom. Selama tahun 2001–2003 peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD semakin menurun. Menurunnya peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan pengeluaran total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan (Mahi, 2005) dalam penelitian Waluyo (2007). Tujuan

utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*) (Ehtisham, 2002) dalam penelitian Waluyo (2007). Ketergantungan terhadap dana perimbangan seperti DAU merupakan hambatan bagi pemerintah daerah dalam memperoleh dan mengintensifkan pendapatan asli daerahnya (Brodjonegoro, 2002). Brodjonegoro dan Martinez (2002) mengungkapkan korelasi negatif yang signifikan antara besarnya jumlah DAU dan Pendapatan Asli Daerah.

Brata (2004) dalam penelitian Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan dan Bantuan. Penelitian lain yang dilakukan Harimurti (2005) berhasil membuktikan peningkatan PAD akibat adanya tekanan fiskal setelah digulirkannya kebijakan fiskal.

Desentralisasi fiskal telah memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap keuangan daerah. Dengan penerimaan transfer dana dari pusat, alokasi anggaran pembangunan semakin meningkat sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan *public services* dan penyediaan *public goods*. Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan,

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial (pasal 167 ayat 1-2).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur desentralisasi (pelimpahan wewenang dan tanggung jawab) di bidang administrasi dan di bidang politik kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah dan diikuti perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip “*money follows function*” yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999. Tetapi mengingat desentralisasi di bidang administrasi juga berarti transfer personal (Pegawai Negeri Sipil) yang penggajiannya menjadi tanggung jawab daerah, prinsip “*money follows function*”, atau sebut saja penggunaan anggaran sesuai fungsinya, tidak mungkin berlangsung. Menurut Lewis (2001) dalam penelitian Landiyanto (2005), hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi sumber utama pendapatan daerah pada umumnya sebagian besar akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, sehingga anggaran untuk pembangunan menjadi kecil. Siregar (2001) dalam penelitian Landiyanto (2005) mengemukakan bahwa bagi banyak daerah, pengeluaran untuk pembangunan tahun anggaran 2001 (setelah otonomi daerah/desentralisasi) lebih rendah dari pos pengeluaran yang sama tahun anggaran 2000 (sebelum desentralisasi).

Menurut Andriono (2003), belanja publik di daerah rata-rata baru sekitar 20-30 persen. Penyebabnya antara lain PAD yang minim, sehingga sumber utama APBD masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat (terutama DAU). Sedangkan DAU sendiri lebih banyak digunakan untuk

membiayai gaji pegawai dan kegiatan operasional pemerintah daerah. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005) dalam penelitian Harianto dan Adi (2007).

Penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap PAD dan Belanja Publik secara empiris pernah dilakukan oleh Purwantoro (2007). Yang menjadi sampel penelitiannya adalah kabupaten dan kota yang ada di pulau Jawa. Hasil penelitian yang dilakukan berhasil mendukung adanya pengaruh positif pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan belanja publik.

Dalam penelitiannya Harianto dan Adi (2007) diperoleh temuan empiris yang menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) semakin memperkuat kecenderungan ini. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini. Chang dan Ho (2002) dalam penelitian Maimunah (2006) menyatakan hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris. Holtz-Eakin *et al* (1985) dalam penelitian Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat

keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Gamkhar dan Oates (1996) dalam penelitian Maimunah (2006) menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cut in the federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah.

G. Kerangka Pikir

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, kondisi perumahan, sosial, budaya serta jaminan persamaan hak dalam politik, hukum dan keamanan/ketertiban. Indikator-indikator output tersebut baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (komposit) dapat memberikan gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari aspek sosial.

Perekonomian dapat dikatakan sedang tumbuh/berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa yang timbul yang bertujuan mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita, dan hal ini berlangsung dalam jangka panjang, sehingga sekalipun ada satu waktu dimana peningkatan pendapatan perkapita seolah-olah terhenti, tetapi bila di waktu-waktu selanjutnya tetapi terjadi peningkatan, maka itu tetap disebut terdapat pembangunan ekonomi.

Pendapatan perkapita sebagai satu indikator keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada pertambahan jumlah penduduk. Suatu negara yang mengalami kenaikan pendapatan nasional belum bisa dikatakan telah mengalami pembangunan ekonomi sebab apabila ternyata kenaikan pendapatan nasional itu diikuti oleh kenaikan penduduk yang lebih

besar secara proporsional, maka negara tersebut justru akan mengalami penurunan dalam pendapatan perkapitanya (Prayitno, 1989: 42).

Mustafa (2002: 66) mengemukakan bahwa sebagian besar upaya yang dilakukan daerah untuk bisa mengurangi dana yang diperoleh dari pemerintah pusat adalah dengan memacu upaya memperoleh pendapatan asli daerah sebesar mungkin. Metode yang paling populer sampai dengan saat ini adalah dengan mengeksploitasi sumber daya alam daerah yang ada, dan melalui pajak dan retribusi daerah. Cara pertama sangat mungkin dilakukan, apabila di daerah sumber daya alamnya memang berlimpah, namun bagi daerah yang miskin akan sumber daya alam umumnya mengambil jalan lain yaitu meningkatkan penerimaan dengan cara kedua.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2002, prioritas anggaran belanja pembangunan juga akan diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, mempersiapkan pemilu yang demokratis, memantapkan persatuan kesatuan dan ketertiban umum, membangun dan memelihara sarana dan prasarana dasar penunjang pembangunan ekonomi, serta meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

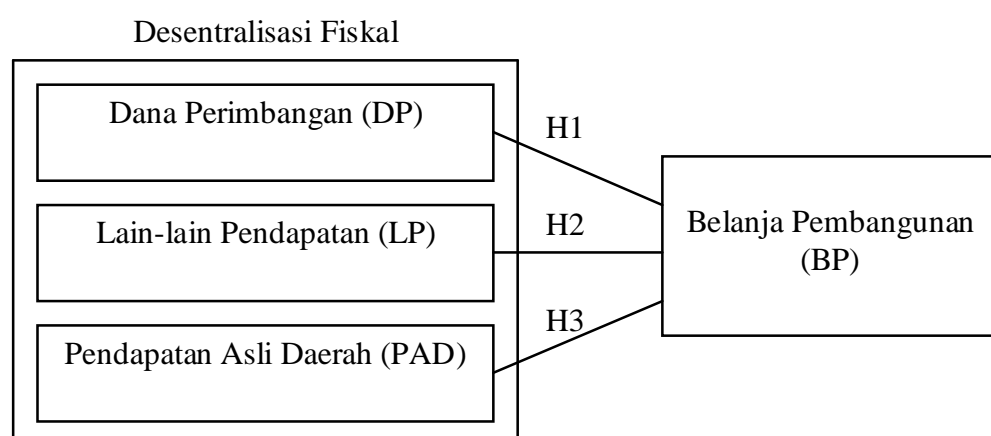
Indikator pendapatan asli daerah adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Belanja penunjang dan belanja modal yang diprogramkan

dalam setiap sektor maupun subsektor merupakan indikator dari belanja pembangunan.

Keberhasilan suatu daerah ditentukan oleh banyak hal, salah satunya adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan unsur pokok akan dalam menyusun suatu belanja pembangunan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih merata.

Pencapaian target penerimaan pajak penghasilan masih akan sulit mengingat sangat rendahnya perkiraan laju pertumbuhan ekonomi (Anwar, 1986: 87). Terkait dengan penelitian ini menunjukkan bahwa pajak (salah satu sumber pendapatan asli daerah) tergantung pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Hubungan desentralisasi fiskal dengan belanja pembangunan dapat dijelaskan pada gambar berikut ini:

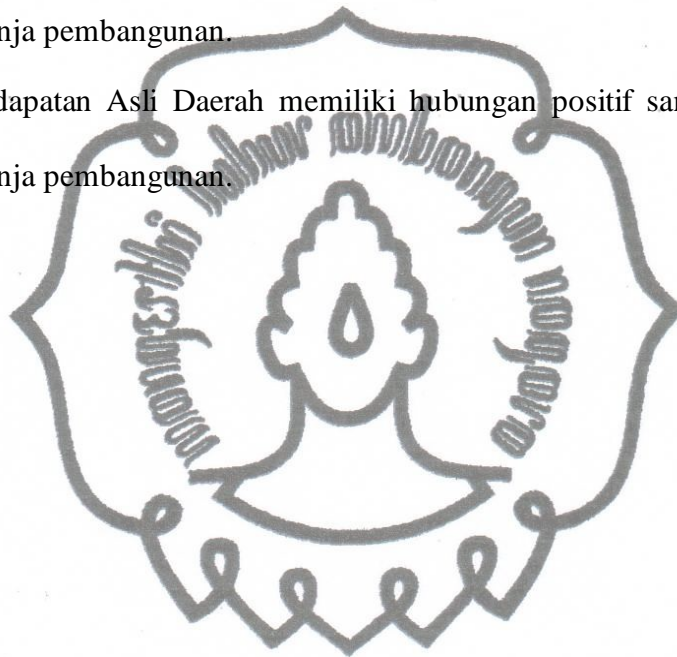


Gambar 2.1. Konstelasi Variabel Penelitian.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dana perimbangan memiliki hubungan positif sangat kuat dengan belanja pembangunan.
2. Lain-lain pendapatan memiliki hubungan positif sangat kuat dengan belanja pembangunan.
3. Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan positif sangat kuat dengan belanja pembangunan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Lokasi Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena dalam penelitian ini antara variabel bebas dan variabel terikat diukur dalam bentuk angka-angka. Metode kuantitatif (penelitian dalam angka) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan belanja pembangunan daerah di Kabupaten Klaten.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Klaten. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Klaten sebagai daerah otonomi memiliki kewenangan yang semakin luas untuk memberdayakan dirinya terutama berkaitan dengan pengelolaan potensi dan sumber pendanaan yang dimiliki. Sehingga diharapkan apabila pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien, akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi terkait yaitu Bappeda, BPS dan DPPKAD Kabupaten Klaten. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang kondisi

keuangan daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002: 206). Metode dokumentasi yaitu mempelajari buku-buku, data-data maupun arsip yang ada di lokasi penelitian yang ada relevansinya. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan data pelengkap atau data pendukung yang belum terungkap melalui teknik lain.

2. Metode Observasi

Menurut Arikunto (2002: 232) metode observasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam suatu kegiatan penelitian dengan mengadakan pengamatan yang dilengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.

Metode observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian mengenai gejala-gejala yang ada yang dapat menunjang penelitian.

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002: 96). Dalam penelitian ini ada 2 (dua) variabel yang diungkap, yaitu:

1. Desentralisasi fiskal adalah adanya pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik dalam sisi anggaran maupun penerimaan dan pengeluaran, meliputi:

- a. Dana Perimbangan (DP)

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, diukur dengan indikator: dana bagi hasil dalam rupiah, dana alokasi umum dalam rupiah, dan dana alokasi khusus dalam rupiah.

- b. Lain-lain Pendapatan (LP)

Lain-lain pendapatan adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, diukur dengan indikator: pendapatan yang ditetapkan pemerintah dalam rupiah dan lain-lain pendapatan dalam rupiah.

- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diukur dengan indikator: pajak daerah dalam rupiah, retribusi daerah dalam rupiah, bagian laba usaha daerah dalam rupiah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam rupiah.

2. Belanja pembangunan adalah belanja pembangunan yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai, diukur dengan indikator: belanja penunjang dan belanja modal dalam rupiah yang diprogramkan dalam setiap sektor maupun subsektor.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis statistik deskriptif

Analisis ini menggunakan alat-alat seperti rata-rata (mean), median, nilai maksimum, dan nilai minimum. Analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Pembangunan selama tahun 2005-2009.

2. Analisis *Korelasi Product Moment*

Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih (Sugiono, 2010: 224). Lebih lanjut Sugiono mengatakan bahwa arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi.

Hubungan dua variabel atau lebih dikatakan hubungan positif, bila nilai suatu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lain, dan sebaliknya bila suatu variabel diturunkan maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Hubungan dua variabel atau lebih dikatakan hubungan negatif, bila nilai suatu variabel dinaikkan, maka akan menurunkan variabel yang lain, dan sebaliknya bila suatu variabel diturunkan maka akan menaikkan nilai variabel yang lain.

Teknik korelasi Product Moment digunakan untuk mencari hubungan secara parsial antara variabel X dengan variabel Y. Rumus korelasi product moment dari Pearson yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiono, 2010: 228):

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = koefisien korelasi
 X = Skor hasil variabel bebas
 Y = Skor hasil variabel terikat
 N = Jumlah Subyek.

Hasil uji ini akan diketahui koefisien korelasi Product Moment (r). Setelah r diketahui, untuk menguji taraf signifikansi tidaknya, dikonsultasikan dengan harga r tabel Product Moment dengan taraf signifikansi 5 %. Jika harga koefisien r hitung sama dengan atau lebih besar dari harga r tabel, berarti hipotesis dalam penelitian ini diterima, dan sebaliknya jika harga koefisien r hitung tidak sama dengan atau lebih kecil dari harga r tabel, maka hipotesis ditolak.

Kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif terbesar = 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar = -1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila hubungan dua variabel atau lebih tersebut mempunyai koefisien korelasi = 1 atau -1, maka hubungan tersebut sempurna (Sugiono, 2010: 226).

Menurut Sugiono (2010: 231), untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan, maka dapat berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan dari hubungan dua variabel. Sedangkan angka yang menunjukkan kuat tidaknya hubungan antara dua variabel disebut dengan koefisien korelasi yang dinotasikan dengan “r”. Nilai koefisien korelasi adalah $-1 \leq r \leq 1$. Jika $r = -1$, maka antara dua variabel mempunyai hubungan negatif “sangat” erat. Jika $r = 1$, maka antara dua variabel mempunyai hubungan positif “sangat” erat. Jika $r = 0$, maka antara dua variabel tidak mempunyai hubungan. Jika r semakin mendekati angka -1 atau 1, maka antara dua variabel mempunyai hubungan yang kuat atau erat. Sedangkan jika r lebih mendekati ke angka 0, maka antara dua variabel mempunyai hubungan yang tidak kuat atau tidak erat.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Klaten

Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan langsung dengan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), yang dikenal sebagai salah satu DTW (Daerah Tujuan Wisata). Kabupaten Klaten terletak antara $7^{\circ}32'19''$ Lintang Selatan sampai $7^{\circ}48'33''$ Lintang Selatan dan antara $110^{\circ}26'14''$ Bujur Timur sampai $110^{\circ}47'51''$ Bujur Timur. Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Klaten adalah :

- a. Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIY)
- c. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY)

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan seluas 65.556 ha ($655,56 \text{ km}^2$) atau seluas 2,014% dari luas Propinsi Jawa Tengah, yang luasnya seluas 3.254.412 ha.

Kabupaten Klaten merupakan daerah yang beriklim sedang, artinya memiliki sifat iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun. Kecepatan angin berkisar 20 – 25 knot dan kelembaban relatif bulanan rata-rata 75,20 – 25,60 mm Hg.

commit to user

Suhu/temperatur bulanan rata-rata 28°C – 30°C dengan penguapan bulanan rata-rata berkisar antara 1,97 – 3,37 % dengan lama penyinaran matahari bulanan rata-rata berkisar antara 44,20 – 700,00 %. Curah hujan rata-rata tahunan adalah sebesar 72 mm lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebesar 146 mm.

Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) dataran yaitu:

- a. Dataran Lereng Gunung Merapi membentang disebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung.
- b. Dataran Rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran Lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.
- c. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

Kabupaten Klaten merupakan daratan yang terbagi menjadi daerah datar, bergelombang, curam dan sangat curam. Kondisi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.
Klasifikasi Topografi Wilayah Kabupaten Klaten

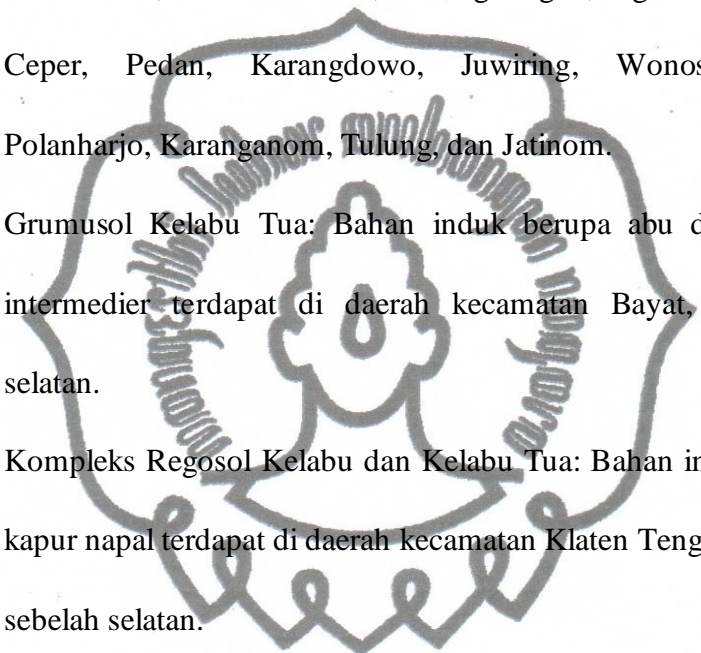
No.	Topografi	Kemiringan (%)	Luas(Ha)
1.	Datar	0 – 2	48.325
2.	Bergelombang	2 – 15	14.508
3.	Curam	15 – 40	1.488
4.	Sangat Curam	> 40	1.235
Jumlah			65.556

Sumber: Klaten Dalam Angka, 2010.

Berdasarkan ketinggian daerah, Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah ketinggian yaitu:

- a. 3,72% terletak diantara ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Juwiring, Karangdowo, dan Cawas.
- b. 83,52% terletak diantara ketinggian 100 – 400 meter diatas permukaan air laut, meliputi kecamatan: Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (bagian selatan), Ngawen (bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (bagian timur), Polanharjo (bagian timur), Delanggu, Juwiring (bagian barat), Wonosari (bagian barat), Manisrenggo, Jogonalan (bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (bagian utara), Ngawen (bagian utara), Jatinom, Karanganom (bagian barat), Tulung, dan Polanharjo (bagian barat).
- c. 12,76% terletak diantara ketinggian 400 – 2500 meter di atas permukaan laut, meliputi kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil), dan Tulung (sebagian kecil).

Klasifikasi tanah di Kabupaten Klaten terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu:

- 
- a. Litosol: Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah kecamatan Bayat.
 - b. Regosol Kelabu: Bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung, dan Jatinom.
 - c. Grumusol Kelabu Tua: Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.
 - d. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua: Bahan induk berupa batu kapur napal terdapat di daerah kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.
 - e. Regosol Coklat Kekelabuan: Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

2. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten terbagi atas tanah sawah dan tanah kering. Pembagian penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.
Luas Wilayah Menurut Kecamatan, Tanah Sawah Dan Tanah Kering
Di Kabupaten Klaten Tahun 2010 (Ha)

No	Kecamatan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Luas Wilayah
01	Prambanan	1,260	1,183	2,443
02	Gantiwarno	1,626	938	2,564
03	Wedi	1,557	881	2,438
04	Bayat	817	3,126	3,943
05	Cawas	2,230	1,127	3,447
06	Trucuk	1,923	1,458	3,381
07	Kalikotes	755	545	1,300
08	Kebonarum	727	239	966
09	Jogonalan	1,590	1,080	2,670
10	Manisrenggo	1,514	1,182	2,696
11	Karangnongko	766	1,908	2,674
12	Ngawen	1,051	646	1,697
13	Ceper	1,577	868	2,445
14	Pedan	885	1,032	1,917
15	Karangdowo	2,051	872	2,923
16	Juwiring	2,014	965	2,979
17	Wonosari	2,254	860	3,114
18	Delanggu	1,335	543	1,878
19	Polanharjo	1,831	553	2,384
20	Karanganom	1,695	711	2,406
21	Tulung	1,743	1,457	3,200
22	Jatinom	609	2,944	3,553
23	Kemalang	54	5,112	5,166
24	Klaten Selatan	847	597	1,444
25	Klaten Tengah	324	566	890
26	Klaten Utara	369	669	1,038
	Jumlah	33,494	32,062	65,556

Sumber: Klaten Dalam Angka, 2010

Luas lahan Kabupaten Klaten terbagi atas lahan sawah sebesar 33.494 ha dan lahan bukan sawah (lahan kering) sebesar 32.062 ha. Luas lahan sawah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,07% dibanding

tahun 2009 yaitu 33.541 ha, sedangkan lahan bukan sawah mengalami kenaikan sebesar 0,08% dibanding tahun 2009 yaitu 32.015 ha.

Menurut penggunaannya, luas lahan sawah yang terbesar berpengairan teknis 19,173 ha (57,24%), sedangkan sisanya berpengairan setengah teknis 31,21%, sederhana 7,12% dan tadah hujan 4,42%. Lahan sawah berpengairan teknis mengalami kenaikan sebesar 1,97% dibandingkan tahun 2009 yaitu sebesar 18.795 ha (55,27%),. Lahan sawah dengan pengairan teknis terbesar adalah Kecamatan Wonosari (1.882 ha), pengairan setengah teknis terbesar Kecamatan Tulung (970 ha), pengairan sederhana terbesar adalah Kecamatan Manisrenggo (569 ha), dan pengairan tadah hujan terbesar adalah Kecamatan Bayat (434 ha).

Luas lahan kering menurut penggunaannya terbagi atas bangunan, tegalan, kolam/rawa, hutan dan lain-lain. Luas lahan kering paling banyak digunakan adalah sebagai bangunan dan halaman sebesar 19,920 ha, sedangkan sisanya merupakan tegalan 6,13 ha, kolam/rawa 201 ha, hutan 1,450 ha, lain-lain 4,179 ha atau sebesar 13,03 %. Berikut disajikan luas lahan kering menurut penggunaannya.

3. Kondisi Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2009-2010 mengalami kenaikan sebesar 0,33 %. Tingkat pertumbuhan penduduk paling banyak adalah kecamatan Klaten Utara yaitu sebesar 1.109 jiwa (2,68%) dan paling rendah adalah kecamatan Juwiring yaitu sebesar -281 jiwa (-0,46%). Sementara jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Trucuk

(6,18%) dan terendah adalah kecamatan Kebonarum (1,65%). Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Klaten tercatat 1.286.058 jiwa terdiri dari 627.751 laki-laki dan 658.307 perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki, dengan rasio jenis kelamin sebesar 95,36%. Berikut disajikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan.

Tabel 4.3.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Di Kabupaten Klaten Tahun 2009 – 2010

No	Kecamatan	2009	2010	Penam- bahan Penduduk (Jiwa)	Laju Pertum- buhan (%)
01	Prambanan	45.583	45.411	-172	-0,38
02	Gantiwarno	40.494	40.738	244	0,60
03	Wedi	54.887	55.155	268	0,49
04	Bayat	63.798	63.753	-45	-0,07
05	Cawas	64.695	64.634	-61	-0,09
06	Trucuk	79.198	79.499	301	0,38
07	Kalikotes	36.520	36.683	163	0,44
08	Kebonarum	21.206	21.201	-5	-0,02
09	Jogonalan	57.368	57.524	156	0,27
10	Manisrenggo	41.197	41.405	208	0,50
11	Karangnongko	38.046	38.162	116	0,30
12	Ngawen	43.734	43.850	116	0,26
13	Ceper	63.447	63.619	172	0,27
14	Pedan	47.836	47.804	-32	-0,07
15	Karangdowo	51.659	51.759	100	0,19
16	Juwiring	61.436	61.155	-281	-0,46
17	Wonosari	61.699	62.268	569	0,91
18	Delanggu	44.381	44.419	38	0,09
19	Polanharjo	45.458	45.591	133	0,29
20	Karanganom	49.075	49.079	4	0,01
21	Tulung	54.659	54.827	168	0,31
22	Jatinom	56.811	56.982	171	0,30
23	Kemalang	34.772	34.943	171	0,49
24	Klaten Selatan	40.220	40.678	458	1,13
25	Klaten Tengah	43.355	43.558	203	0,47
26	Klaten Utara	40.252	41.361	1.109	2,68
	Jumlah	1.281.786	1.286.058	4.272	0,33

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2010

Seiring dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, maka kepadatan penduduk juga cenderung mengalami kenaikan. Dengan luas wilayah 655,56 km², maka kepadatan penduduk Kabupaten Klaten adalah 1.962 jiwa per km². Kecamatan yang relatif padat penduduknya adalah kecamatan Klaten Tengah dan Klaten Utara. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di kecamatan Kemalang.

Tabel 4.4.
Kepadatan Penduduk Per Desa Dan Per Km²
Menurut Kecamatan Kabupaten Klaten Tahun 2010

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Rata-rata Penduduk Per Desa	Rata-rata Penduduk Per Km ²
01	Prambanan	24,43	16	45.411	2.838	1.859
02	Gantiwarno	25,64	16	40.738	2.546	1.589
03	Wedi	24,38	19	55.155	2.903	2.262
04	Bayat	39,43	18	63.753	3.542	1.617
05	Cawas	34,47	20	64.634	3.232	1.875
06	Trucuk	33,81	18	79.499	4.417	2.351
07	Kalikotes	12,98	7	36.683	5.240	2.826
08	Kebonarum	9,67	7	21.201	3.029	2.192
09	Jogonalan	26,70	18	57.524	3.196	2.154
10	Manisrenggo	26,96	16	41.405	2.588	1.536
11	Karangnongko	26,74	14	38.162	2.726	1.427
12	Ngawen	16,97	13	43.850	3.373	2.584
13	Ceper	24,45	18	63.619	3.534	2.602
14	Pedan	19,17	14	47.804	3.415	2.494
15	Karangdowo	29,23	19	51.759	2.724	1.771
16	Juwiring	29,79	19	61.155	3.219	2.053
17	Wonosari	31,14	18	62.268	3.459	2.000
18	Delanggu	18,78	16	44.419	2.776	2.365
19	Polanharjo	23,84	18	45.591	2.533	1.912
20	Karanganom	24,06	19	49.079	2.583	2.040
21	Tulung	32,00	18	54.827	3.046	1.713
22	Jatinom	35,53	18	56.982	3.166	1.604
23	Kemalang	51,66	13	34.943	2.688	676

24	Klaten Selatan	14,43	12	40.678	3.390	2.819
25	Klaten Tengah	8,92	9	43.558	4.840	4.883
26	Klaten Utara	10,38	8	41.361	5.170	3.985
	Jumlah	655,56	401	1.286.058	3.207	1.962

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2010

4. Kondisi Pendidikan

Jumlah sekolah di Kabupaten Klaten disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5.
Jumlah Sekolah Di kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2010

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		
		2008	2009	2010
1	Taman Kanak-kanak (TK)			
	a. Negeri	1	1	1
	b. Swasta	834	811	867
2	Sekolah Dasar (SD)			
	a. Negeri	802	787	778
	b. Swasta	16	16	18
3	SLTP			
	a. Negeri	65	65	65
	b. Swasta	47	46	45
	c. Terbuka	3	3	2
4	SLTA			
	a. Negeri	16	16	16
	b. Swasta	18	18	16
5	SMK			
	a. Negeri	8	8	9
	b. Swasta: - SMEA	17	17	17
	- Non SMEA	26	26	27

Sumber: Klaten Dalam Angka, 2010

Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Klaten yang berstatus Negeri dalam 3 tahun terakhir tidak berubah, sedangkan TK Swasta dari tahun 2008 mengalami kenaikan pada tahun 2010, meskipun pada tahun 2009 terjadi penurunan. Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami penurunan, ini disebabkan ada

beberapa SD yang digabungkan jadi satu. SD Swasta justru mengalami kenaikan dari tahun 2008 ke tahun 2010.

Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 relatif stabil (tetap), namun untuk SLTP Swasta dan SLTP Terbuka cenderung mengalami penurunan. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) juga tidak mengalami perubahan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Sedangkan untuk SLTA Swasta dari tahun 2008 sampai tahun 2010 mengalami penurunan. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri mengalami peningkatan, sedangkan untuk SMK Swasta (SMEA) adalah tetap dan SMK Swasta (Non SMEA) mengalami peningkatan.

Kondisi anak-anak yang bersekolah di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun adalah fluktuatif.

Tabel 4.6.
Jumlah Siswa Di Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2010

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		
		2008	2009	2010
1	Taman Kanak-kanak (TK)			
	a. Negeri	83	80	76
	b. Swasta	22.494	25.142	27.964
2	Sekolah Dasar (SD)			
	a. Negeri	110.471	107.414	105.906
	b. Swasta	3.396	3.433	4.055
3	SLTP			
	a. Negeri	40.169	40.822	41.340
	b. Swasta	10.329	9.708	9.094
	c. Terbuka	241	216	193
4	SLTA			
	a. Negeri	11.956	12.158	12.145
	b. Swasta	5.202	5.202	3.602
5	SMK			

	a. Negeri	5.834	5.818	6.212
	b. Swasta: - SMEA	9.126	8.431	7.902
	- Non SMEA	12.208	11.618	11.300

Sumber: Klaten Dalam Angka, 2010

Untuk siswa TK Negeri maupun Swasta dari tahun 2008 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan 19,48%. Jumlah siswa SD Negeri maupun Swasta dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 3,43%. Untuk jumlah siswa SLTP Negeri, Swasta maupun Terbuka dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,22%. Siswa SLTA Negeri maupun Swasta mengalami penurunan sebesar 8,22%, dan SMK Negeri, Swasta baik SMEA maupun Non SMEA mengalami penurunan sebesar 4,46%.

5. Kondisi Ketenagakerjaan

Penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki akan sangat mendukung laju perekonomian di Kabupaten Klaten.

Tabel 4.7.
Pencari Kerja Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Klaten Tahun 2006 – 2010

No	Pendidikan Dan Jenis Kelamin	Jumlah Pencari Kerja (Orang)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	SD					
	- Laki-laki	10	10	1	1	0
	- Wanita	42	25	5	2	12
2	SLTP					
	- Laki-laki	249	234	121	38	25
	- Wanita	645	569	227	78	41
3	SMU / SMK					
	- Laki-laki	3.987	4.957	4.925	5.369	7.215
	- Wanita	3.682	4.779	4.752	4.809	7.142
4	Sarjana Muda					
	- Laki-laki	216	356	515	1.166	906

	- Wanita	309	659	1.007	1.326	1.346
5	Sarjana					
	- Laki-laki	744	1.309	1.496	3.963	1.885
	- Wanita	688	1.371	1.867	4.368	2.271
	Jumlah	10.572	14.269	14.914	21.120	20.843

Sumber: Klaten Dalam Angka, 2010

Banyaknya pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Klaten pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 1,31% dibanding tahun 2004. Sebagian besar yakni sebanyak 14.657 orang (68,88%) berpendidikan SMU/SMK, diikuti lulusan sarjana sebanyak 4.156 orang (19,94%), lulusan sarjana muda sebanyak 2.252 orang (10,8%). Pencari kerja yang berpendidikan SD sebanyak 12 orang (0,05%) dan SLTP tercatat 66 orang (0,32%).

6. Sarana Transportasi

Sebagian besar jalan di Kabupaten Klaten sudah beraspal sedangkan sisanya masih merupakan jalan tanah.

Tabel 4.8.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi Dan Kelas Jalan
Di Kabupaten Klaten Tahun 2010 (Km)

No	Kondisi	Panjang Jalan	Persentase
I	Jenis Permukaan		
	a. Diaspal	688,24	88,58
	b. Kerikil	-	-
	c. Tanah	88,72	11,42
	d. Tidak Dirinci	-	-
	Jumlah	776,96	100,00
II	Kondisi Jalan		
	a. Baik	109,59	14,10
	b. Sedang	195,72	25,19
	c. Rusak	319,31	41,10
	d. Rusak Berat	152,34	19,61
	Jumlah	776,96	100,00
	Kelas Jalan		
	a. Kelas I	-	-
	b. Kelas II	-	-

c. Kelas III	-	-
d. Kelas IIIA	-	-
e. Kelas IIIB	-	-
f. Kelas IIIC	688,24	88,58
g. Kelas IV	88,72	11,42
h. Kelas Tidak Dirinci		0,00
Jumlah	776,96	100,00

Sumber: Klaten Dalam Angka, 2010.

Kondisi jalan di Kabupaten Klaten terbagi dalam keadaan baik, sedang, rusak dan rusak berat.. Kelas jalan di Kabupaten Klaten sebagian besar adalah kelas IIIC dan kelas IV .

Jenis jalan di Kabupaten Klaten mayoritas terbagi atas jalan kabupaten dan jalan desa sisanya adalah jalan propinsi dan jalan lingkungan

Tabel 4.9.
Panjang Jalan Kabupaten Klaten Menurut Jenisnya 2010 (Km)

No	Kecamatan	Jalan Propinsi	Jalan Kabupaten	Poros Desa	Lingkungan
01	Prambanan	-	39,140	78,580	43,350
02	Gantiwarno	-	47,540	136,950	27,900
03	Wedi	-	24,880	88,068	48,160
04	Bayat	-	25,630	87,815	93,130
05	Cawas	8,100	37,180	101,215	87,335
06	Trucuk	0,940	36,920	104,635	98,287
07	Kalikotes	-	20,580	84,688	74,373
08	Kebonarum	-	20,440	42,825	10,725
09	Jogonalan	-	25,970	81,141	65,710
10	Manisrenggo	-	28,430	105,840	51,050
11	Karangnongko	-	38,320	74,540	37,735
12	Ngawen	2,900	25,220	64,460	58,700
13	Ceper	5,000	16,370	81,570	77,255
14	Pedan	6,100	25,210	64,520	75,005
15	Karangdowo	-	22,140	107.315	37,319
16	Juwiring	-	31,190	121.645	83,074
17	Wonosari	-	31,020	54.810	57,820
18	Delanggu	-	20,920	57.543	57,415
19	Polanharjo	-	28,610	95.266	56,275
20	Karanganom	-	26,200	100.650	81,088
21	Tulung	6,000	37,370	107.330	79,390

22	Jatinom	4,400	33,060	83.550	98,780
23	Kemalang	-	35,810	137.450	26,100
24	Klaten Selatan	-	26,700	59.280	30,404
25	Klaten Tengah	-	42,880	24.850	13,460
26	Klaten Utara	1,400	29,230	24.500	24,770
	Jumlah	34,840	776,960	2.171,036	1.494,610

Sumber: Klaten Dalam Angka, 2010

7. Sarana Pengairan

Wilayah Kabupaten Klaten termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo yaitu Sub DAS Bengawan Solo Hulu. Kabupaten Klaten juga merupakan daerah tangkapan air hujan untuk satuan wilayah DAS Bengawan Solo. Tetapi tidak semua daerah yang ada di Kabupaten Klaten merupakan daerah tangkapan air, yang sebagian besar berada pada daerah utara Kabupaten Klaten yaitu Kecamatan Polanharjo dan Tulung.

Sungai besar yang mengalir dari atas pegunungan menuju dan bermuara di Bengawan Solo diantaranya: Kali Dengkeng, Simping, Pusur, Brambang, dan Soko. Sungai-sungai tersebut mempunyai beberapa anak sungai pada hulunya. Dengan adanya banyak sungai (air permukaan) yang mengalir di Kabupaten Klaten, akan membawa manfaat dan pengaruh terhadap kedalaman air tanah. Potensi sumber daya air terutama sungai di Kabupaten Klaten yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan dan pemanfaatan air ada 80 sungai dengan klasifikasi 1 sungai induk, 1 sungai ordo 1, 25 sungai ordo 2 dan 53 sungai ordo 3.

8. Sarana Kesehatan

Rumah Sakit Umum baik itu RSUP, RS Swasta, Rumah Sakit Jiwa Daerah dan BP-4 yang terdapat di Kabupaten Klaten adalah sebanyak 9 buah.

Tabel 4.10.
Rumah Sakit Menurut Jenisnya Kabupaten Klaten
Tahun 2006 – 2010

No	Tahun	RSUP	RS Swasta	Rumah Sakit Jiwa Daerah	BP-4
1	2006	1	4	1	1
2	2007	1	4	1	1
3	2008	1	5	1	1
4	2009	1	6	1	1
5	2010	1	6	1	1

Sumber: Klaten Dalam Angka, 2010

Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan yang terdekat dan ekonomis bagi masyarakat. Maka dari itu diharapkan keberadaan Puskesmas dapat menjangkau seluruh masyarakat di tingkat kecamatan bahkan sampai ke tingkat pedesaan.

Tabel 4.11.
Puskesmas Dan Posyandu Di Kabupaten Klaten
Tahun 2006 - 2010

No	Tahun	Puskesmas	Puskesmas Keliling	Posyandu
1	2006	34	31	2.115
2	2007	34	31	2.115
3	2008	34	34	2.115
4	2009	34	34	2.124
5	2010	34	34	2.124

Sumber: Dinas Kesehatan & Kesejahteraan Sosial Kab. Klaten 2010

Disamping sarana fisik yang memadai, untuk mewujudkan tercapainya pembangunan kesehatan harus didukung oleh sumber daya

manusia yang profesional seperti dokter, perawat, bidan dan sebagainya. Jumlah dokter baik dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang ijinnya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten pada tahun 2010 mengalami penurunan 70,8% dibanding tahun 2009.

Tabel 4.12.
Dokter Praktek Yang Ijinnya Dikeluarkan
Di Kabupaten Klaten Tahun 2009 – 2010

No	Uraian	2009	2010
1	Dokter Umum	95	25
2	Dokter Gigi	25	6
3	Dokter Spesialis	17	9
	Jumlah	137	40

Sumber: Dinas Kesehatan & Kesejahteraan Sosial Kab. Klaten 2010

Penempatan bidan didesa mempunyai nilai strategis yang besar dan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak. Bidan Desa yang ditempatkan di Kabupaten Klaten baru sekitar 271 orang, ini masih jauh dari mencukupi mengingat Kabupaten Klaten terdiri dari 401 desa.

Tabel 4.13.
Bidan, Bidan Desa, Dokter Gigi dan Asisten Apoteker
Di Kabupaten Klaten Tahun 2006 – 2010

No	Tahun	Bidan	Bidan Desa	Dokter Gigi PNS / PTT	Asisten Apoteker
1	2006	131	207	22	24
2	2007	94	228	30	24
3	2008	105	226	23	23
4	2009	104	235	35	27
5	2010	95	271	40	24

Sumber: Dinas Kesehatan & Kesejahteraan Sosial Kab. Klaten 2010

9. Kondisi Perekonomian

commit to user

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dilakukan suatu daerah adalah dengan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah tersebut yang dapat dilihat dari hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari PDRB diketahui pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi, kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang dominan, struktur perekonomian daerah, serta PDRB Per Kapita.

Tabel 4.14.
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kecamatan
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Jutaan Rupiah)

Kecamatan	Berlaku		Konstan	
	2008	2009	2008	2009
Prambanan	130.717,90	141.706,32	41.126,04	42.315,03
Gantiwarno	91.744,99	98.890,49	27.865,47	28.480,52
Wedi	117.111,12	128.676,94	36.232,49	37.651,82
Bayat	99.223,54	106.466,40	30.223,14	30.753,45
Cawas	159.968,21	177.659,29	47.984,45	50.374,17
Trucuk	353.488,59	401.269,94	111.705,51	119.672,18
Kalikotes	80.897,72	86.468,62	25.120,33	25.453,48
Kebonarum	48.904,86	51.456,95	14.442,44	14.479,99
Jogonalan	194.253,54	211.941,32	60.233,51	62.360,86
Manisrenggo	130.105,78	140.142,51	38.539,36	39.477,06
Karangnongko	92.294,12	101.276,31	26.373,64	26.710,02
Ngawen	100.532,56	108.363,19	32.167,10	33.192,10
Ceper	467.713,24	528.606,27	149.593,63	159.543,18
Pedan	164.272,52	178.230,08	53.165,57	54.660,13
Karangdowo	102.190,15	111.560,93	28.751,88	29.798,81
Juwiring	120.840,31	138.665,42	37.318,53	40.540,38
Wonosari	142.963,19	158.532,08	42.368,16	44.423,70
Delanggu	228.564,65	243.557,73	73.627,31	75.546,55
Polanharjo	122.021,68	131.205,93	38.166,28	38.961,29
Karanganom	117.935,46	126.276,45	35.450,77	36.077,86
Tulung	174.136,29	183.230,68	49.919,76	50.069,24
Jatinom	111.877,25	119.253,66	33.625,34	34.065,52
Kemalang	96.281,95	101.945,95	26.638,59	26.877,39
Klaten Selatan	186.012,24	203.856,93	60.885,73	63.122,92
Klaten Tengah	384.034,12	428.127,46	130.667,96	137.612,61

Klaten Utara	271.921,00	299.001,12	90.864,25	95.228,73
PDRB	4.290.006,98	4.706.368,97	1.343.057,24	1.397.448,99

Sumber: Klaten Dalam Angka Tahun 2010.

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun dapat dilihat dari perhitungan PDRB untuk tiap-tiap kecamatan, yang memberi kontribusi terhadap perkembangan PDRB Kabupaten Klaten. Kecamatan yang memberi kontribusi PDRB terbesar atas dasar harga berlaku adalah Kecamatan Cepur yaitu 11,23% sedangkan yang memberi kontribusi PDRB terkecil adalah Kecamatan Kebonarum yaitu 1,09%.

Tabel 4. 15.
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Berlaku dan Harga Konstan 1993 Di Kab. Klaten
Tahun 2008-2009 (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2008	2009	2008	2009
1	Pertanian	976.489,86	1.033.481,22	234.554,40	237.048,86
	a. Tanaman Bhn Makanan	700.368,73	754.571,97	166.034,99	170.946,47
	b. Perkebunan	111.890,26	107.396,01	21.861,37	19.094,42
	c. Peternakan	123.368,06	127.296,23	34.371,59	34.505,34
	d. Kehutanan	27.152,39	28.949,69	8.762,79	8.795,29
	e. Perikanan	13.710,42	15.267,32	3.523,66	3.707,34
2	Penggalian	25.064,22	29.687,29	8.355,88	9.179,51
3	Industri Pengolahan	973.051,84	1.084.781,00	314.029,51	329.570,42
4	Listrik Dan Air Minum	48.317,20	63.671,53	15.995,89	19.501,83
5	Bangunan / Konstruksi	371.051,81	420.954,59	126.715,47	134.718,64
6	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	1.100.308,52	1.190.946,04	363.418,36	373.245,55
7	Angkutan Dan Komunikasi	132.959,49	149.087,32	52.736,59	57.871,02
8	Keuangan, Persewaan Dan Jasa	194.928,64	216.065,10	70.054,23	72.216,45

	Perusahaan				
9	Jasa-Jasa	467.835,40	517.694,88	157.196,91	164.096,71
PDRB		4.290.006,98	4.706.368,97	1.343.057,24	1.397.448,99

Sumber: Klaten Dalam Angka, 2010

PDRB menurut lapangan usaha atas harga konstan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 3,89%, dan masih didominasi oleh perdagangan, hotel dan restoran yang mengalami kenaikan sebesar 2,63% disusul oleh peningkatan dari sektor industri pengolahan (4,72%), pertanian (1,05%), jasa-jasa (4,20%), bangunan/konstruksi (5,94%), keuangan, sewa dan jasa perusahaan (2,99%), pengangkutan dan komunikasi (8,87%), listrik, gas dan air bersih (17,98%), serta pertambangan dan penggalian meningkat sebesar 8,97%.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode 2005-2009, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten atas dasar harga konstan adalah sebesar 3,91 persen per tahun, sedangkan dilihat dari harga berlaku menunjukkan angka yang cukup bagus yakni sebesar 11,80%.

Tabel 4. 16.
Pertumbuhan Ekonomi Agregat Kabupaten Klaten 2005 – 2009

No	Tahun	Berlaku		Konstan	
		Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2005	2.948.815,42	9,29	1.199.551,88	3,98
2	2006	3.352.245,35	13,68	1.247.746,75	4,02
3	2007	3.891.798,65	16,10	1.290.967,26	3,46
4	2008	4.290.006,98	10,23	1.343.057,24	4,03
5	2009	4.706.368,97	9,71	1.397.448,99	4,05

Sumber: BPS Kabupaten Klaten Tahun 2010

Dari kondisi yang mulai membaik ini, dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2008 dan tahun 2009 perekonomian Kabupaten Klaten mengalami pertumbuhan positif yang cukup bagus.

Laju pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian daerah. Perkembangan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terjadi di suatu daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur perekonomian daerah tersebut.

Tabel 4. 17.
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kecamatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008 – 2009 (%)

Lapangan Usaha Kecamatan	Pertanian (%)	Penggalian (%)	Industri Pengolahan (%)	Listrik & Air Minum (%)	Bangunan / Konstruksi (%)	Perdagangan, Hotel & Restoran (%)	Angkutan & Komunikasi (%)	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan (%)	Jasa-Jasa (%)	Rata-rata (%)
Prambanan	-6,30	9,01	8,03	20,64	5,91	0,56	8,07	2,39	1,50	5,53
Gantiwarno	0,87	10,58	2,12	17,04	3,66	1,57	2,95	2,21	1,21	4,69
Wedi	2,66	11,10	3,49	19,61	9,17	2,82	6,06	0,91	3,12	6,55
Bayat	0,006	9,66	0,88	36,07	4,68	1,91	3,06	2,03	2,01	6,70
Cawas	6,27	8,29	3,42	18,78	9,28	3,01	5,48	2,37	3,83	6,75
Trucuk	4,24	8,81	9,29	17,13	5,41	4,43	3,68	1,58	4,83	6,59
Kalikotes	-3,27	9,94	2,19	19,01	2,93	0,66	2,57	0,56	2,02	4,07
Kebonarum	-2,93	8,00	1,84	15,76	3,93	0,27	2,62	1,92	1,08	3,61
Jogonalan	-0,21	11,11	2,11	18,01	14,11	1,72	9,51	1,59	3,09	6,78
Manisrenggo	0,20	7,70	8,08	50,46	8,11	1,14	3,10	0,61	1,18	8,95
Karangnongko	0,68	7,47	0,24	17,75	6,07	0,52	2,82	1,51	0,31	4,15
Ngawen	-1,53	7,84	1,31	15,55	6,81	4,70	5,16	0,38	0,43	4,51
Ceper	2,80	12,48	6,77	19,86	4,32	5,02	11,53	2,96	4,21	7,77
Pedan	-0,46	8,04	2,14	18,53	3,45	1,73	9,32	2,83	3,10	5,41
Karangdowo	3,73	10,51	0,71	18,21	11,38	2,03	2,99	1,55	1,52	5,85
Juwiring	5,16	13,26	22,46	-27,67	-274,43	5,26	3,56	1,15	2,11	-27,68
Wonosari	6,32	11,45	2,17	18,71	5,79	3,60	3,41	0,06	1,65	5,91

Delanggu	0,98	7,80	-7,93	19,12	8,70	4,66	20,05	1,21	4,52	6,57
Polanharjo	0,68	7,28	1,71	18,35	4,07	0,79	9,16	0,90	1,95	4,99
Karanganom	-0,73	10,66	1,87	18,18	5,09	1,45	4,38	1,21	2,23	4,93
Tulung	-2,82	7,46	1,19	18,59	8,62	0,75	2,14	0,34	1,53	4,19
Jatinom	0,60	6,92	0,22	18,35	8,22	0,31	6,17	0,61	2,59	4,89
Kemalang	-0,91	6,41	0,42	34,33	4,53	0,73	48,27	0,97	0,84	10,62
Klaten Selatan	-3,05	12,09	1,15	16,98	5,57	1,38	7,94	2,97	3,84	5,43
Klaten Tengah	-4,53	11,27	1,78	14,50	5,32	1,93	12,07	5,06	5,16	5,84
Klaten Utara	-5,80	12,36	2,02	13,41	4,21	2,53	11,28	3,52	5,79	5,48

Sumber: BPS Kabupaten Klaten Tahun 2010, data diolah

Pencapaian pertumbuhan tertinggi (di atas 7 %) adalah kecamatan Kemalang (10,62%), diikuti kecamatan Manisrenggo (8,95%) dan kecamatan Ceper (7,77%). Laju pertumbuhan perekonomian ketiga kecamatan tersebut lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kabupaten Klaten yang mencapai 7,11% pada tahun 2009, sementara kecamatan Karangdowo mengalami tumbuh negatif 27,68%.

c. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Indikator ekonomi makro yang sering digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai tingkat kemakmuran masyarakat adalah angka PDRB Per Kapita. Namun angka ini belum mencerminkan nilai yang betul-betul diperoleh oleh masyarakat (Pendapatan Per Kapita). Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Klaten atas dasar harga berlaku selama tiga tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan.

Tabel 4.18.
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Klaten 2007 – 2009

No	Tahun	Berlaku		Konstan	
		Nilai	Pertum-	Nilai	Pertum-

		(Rupiah)	buhan (%)	(Rupiah)	buhan (%)
1	2007	3.068.266,67	15,50	1.017.789,50	2,94
2	2008	3.365.344,83	9,68	1.053.576,55	3,52
3	2009	3.678.324,96	9,30	1.092.194,76	3,67

Sumber: BPS Kabupaten Klaten Tahun 2010

Pada tahun 2007 PDRB Per Kapita Kabupaten Klaten sebesar 3.068.266,67 dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 3.365.344,85 atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,68%. Pada tahun 2009 Rp. 3.678.324,96 atau mengalami peningkatan sebesar 9,30%.

Pencapaian nilai tertinggi PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku untuk tingkat kecamatan di Kabupaten Klaten, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.19.
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Menurut Kecamatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Jutaan Rupiah)

Kecamatan	Berlaku		Konstan	
	2008	2009	2008	2009
Prambanan	2.917.354,43	3.142.047,01	917.848,55	938.249,00
Gantiwarno	2.287.676,79	2.452.337,01	694.830,19	706.274,52
Wedi	2.146.622,19	2.343.543,45	664.133,92	685.738,07
Bayat	1.561.100,38	1.670.768,80	475.505,66	482.611,46
Cawas	2.474.870,59	2.744.620,58	742.368,15	778.219,84
Trucuk	4.503.555,69	5.083.098,22	1.423.163,29	1.515.950,70
Kalikotes	2.231.845,95	2.372.903,95	693.031,98	698.503,84
Kebonarum	2.309.774,71	2.427.329,12	682.115,90	683.050,62
Jogonalan	3.408.016,63	3.703.778,55	1.056.746,79	1.089.786,62
Manisrenggo	3.186.914,39	3.409.295,72	944.013,72	960.372,21
Karangnongko	2.439.771,60	2.668.396,22	697.180,47	703.747,17
Ngawen	2.311.199,60	2.479.253,00	739.507,56	759.405,60
Ceper	7.413.311,57	8.348.435,99	2.371.077,17	2.519.712,88
Pedan	3.435.872,92	3.725.233,68	1.111.994,52	1.142.465,72
Karangdowo	1.983.042,58	2.160.651,71	557.942,25	577.127,22
Juwiring	1.965.682,15	2.255.529,13	607.052,14	659.429,06

Wonosari	2.329.453,01	2.573.781,64	690.350,00	721.222,50
Delanggu	5.154.237,23	5.491.718,83	1.660.329,46	1.703.417,14
Polanharjo	2.699.953,09	2.891.845,67	844.498,83	858.726,72
Karanganom	2.401.063,97	2.570.774,63	721.747,02	734.484,12
Tulung	3.202.506,48	3.358.210,48	918.064,55	917.657,71
Jatinom	1.982.092,87	2.102.831,20	595.729,22	600.686,29
Kemalang	2.791.023,86	2.938.770,54	772.200,19	774.787,84
Klaten Selatan	4.678.140,94	5.094.512,81	1.531.254,21	1.577.481,44
Klaten Tengah	8.904.519,57	9.900.045,32	3.029.770,91	3.182.162,33
Klaten Utara	6.816.771,12	7.438.208,87	2.277.870,64	2.368.991,74
PDRB	3.365.344,85	3.678.324,96	1.053.576,56	1.092.194,76

Sumber: BPS Kabupaten Klaten Tahun 2010

Jika dilihat dari nilai PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.053.576,55 atau mengalami peningkatan sebesar 3,52% dan pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 1.092.194,76 atau mengalami peningkatan sebesar 3,67%. Hal ini berarti terjadi kenaikan produksi secara riil sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk yang menikmati hasil produksi jika diimbangi peningkatan produksi secara riil maka diharapkan distribusi hasil produksi kepada masing-masing penduduk akan lebih seimbang.

Pencapaian nilai tertinggi PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku untuk tingkat kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 2008 adalah kecamatan Klaten Tengah sebesar Rp. 8.904.519,57 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 9.900.045,32 atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,15%. Nilai terendah PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 dicapai oleh kecamatan Bayat sebesar Rp. 1.561.100,38 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 1.670.768,80 atau mengalami peningkatan sebesar 6,56%.

Nilai tertinggi PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2008 dicapai oleh kecamatan Klaten Tengah yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,78% pada tahun 2009. Pencapaian nilai terendah PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2008 adalah kecamatan Bayat yang meningkat sebesar 1,47% pada tahun 2009 .

d. Investasi Daerah

Dalam mendukung perkembangan perekonomian nasional maupun regional, Pemerintah masih menempatkan sektor investasi menjadi tumpuan bagi berputarnya roda perekonomian. Hal ini dikarenakan investasi memiliki *multiplier effect* dalam perkembangan perekonomian dalam meningkatkan pendapatan negara dan daerah, penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi serta peningkatan devisa yang ada, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Klaten memiliki banyak sekali investasi daerah, meliputi industri, energi dan air minum. Salah satu sektor yang mempunyai peranan cukup penting dalam meningkatkan jumlah PDRB Kabupaten Klaten adalah sektor industri. Dinas Perindustrian mengelompokkan industri dari jumlah asset yang dimiliki menjadi industri besar/menengah dan industri kecil. Sedangkan BPS mengelompokkan industri dari jumlah tenaga kerja menjadi industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Karena perannya yang sangat

penting dalam meningkatkan jumlah PDRB, maka pembangunan di sektor industri merupakan salah satu prioritas utama tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lainnya. Dalam dua tahun terakhir industri yang memberi sumbangan terbesar bagi PDRB Kabupaten Klaten adalah industri pariwisata yaitu perdagangan, hotel dan restoran sebesar 26,71% serta industri pengolahan sebesar 23,58%.

Kelompok sentra industri di Kabupaten Klaten terbagi atas dua kelompok sektor yaitu sektor industri hasil pertanian dan kehutanan serta sektor industri logam mesin kimia dan aneka. Pada tahun 2010 jumlah kelompok industri yang ada di Kabupaten Klaten adalah sebesar 294 sektor terdiri dari sektor industri hasil pertanian dan kehutanan sebesar 110 kelompok (37,41 %) dengan 3.429 unit usaha atau sebesar 36,98 persen dan sektor industri logam mesin kimia dan aneka sebesar 184 kelompok (62,59%) dengan 5.843 unit usaha atau sebesar 63,02 persen. Hal ini berarti industri logam mesin kimia dan aneka mempunyai peranan yang lebih besar dalam menaikkan pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten.

Tabel 4.20.
Kelompok Sentra Industri Dan Jumlah Unit Usaha Menurut Sektor Usaha Di Kabupaten Klaten Tahun 2010

No	Cabang Industri/Sektor Usaha	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit Usaha
1	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	110	3.429
2	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka	184	5.843
	Jumlah	294	9.272

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kab. Klaten 2010

Jumlah perusahaan industri besar/menengah maupun industri kecil di Kabupaten Klaten dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,14%. Tapi pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,08%. Namun demikian dibanding tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 0,06%. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri mengalami kenaikan sebesar 0,09% dari tahun 2008-2009. Begitu juga tahun 2009-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,04%.

Nilai investasi dari sektor industri yang ditanamkan di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan sebesar 20,61% pada tahun 2008-2009. Sedangkan tahun 2009-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,23%. Nilai produksi dari sektor industri mengalami kenaikan sebesar 6,01% pada tahun 2008-2009. Pada tahun 2009-2010 mengalami pertumbuhan positif 15,12%.

Tabel 4.21.

Perusahaan Industri Dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha
Di Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2010

No	Kelompok Industri	Tahun		
		2008	2009	2010
I	Industri Besar/Menengah			
	a. Jumlah Unit Usaha	261	126	126
	b. Jumlah Tenaga Kerja	13.885	11.125	11.125
	c. Investasi (000 Rp)	320.300.000	584.936.000	588.936.000
	d. Nilai Produksi (000Rp)	459.567.290	510.483.599	945.164.965
II	Industri Kecil			
	a. Jumlah Unit Usaha	35.606	35.791	35.762
	b. Jumlah Tenaga Kerja	142.353	145.263	145.270
	c. Investasi (000 Rp)	1.062.641.500	1.156.961.500	1.156.961.500
	d. Nilai Produksi	2.700.606.850	2.851.693.363	3.016.004.650

	(000Rp)			
--	---------	--	--	--

Sumber: Klaten Dalam Angka, 2010

Tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Klaten mempunyai basis industri yang berbeda-beda. Perusahaan industri terbanyak terdapat di kecamatan Trucuk. Posisi kedua adalah kecamatan Ceper diikuti Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Karangdowo. Kecamatan Trucuk mempunyai perusahaan industri terbanyak dikarenakan merupakan daerah penghasil tembakau terbesar di Kabupaten Klaten, diikuti oleh kecamatan Manisrenggo. Sedangkan kecamatan Ceper merupakan sentra industri logam dan mesin. Kecamatan Karangdowo merupakan sentra industri kayu dan mebel.

Selain dikenal sebagai daerah penghasil beras, Kabupaten Klaten juga merupakan penghasil ikan air tawar dan juga produksi air kemasan/air mineral. Total investasi (dengan fasilitas) yang ditanamkan oleh PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 1.615.836.500.000,00. Sedang untuk investasi yang ditanamkan (non fasilitas) adalah sebesar Rp. 1.071.113.176.344,00.

Tabel 4.22.
Realisasi Penanaman Modal PMA/PMDN
Kabupaten Klaten Tahun 2010

No	Sektor Usaha	Jumlah Usaha	Nilai Investasi	Jumlah Tenaga Kerja	Status
1	Perikanan	1	1.045.000.000	85	PMA
2	Mesin dan Logam	1	753.586.550	64	PMA
3	Air Minum	1	925.523.341	291	PMA

	Dalam Kemasan				
4	Furniture	3	1.330.000.000	350	PMA
5	Sarung Tangan Olah Raga	1	3.000.000.000	345	PMA
6	Pertanian	3	36.648.820.246	611	PMA
7	Tekstil	1	7.500.000.000	800	PMDN
8	Bubur Bayi Dan Susu	1	223.636.246.207	303	PMDN
9	Jasa Rekreasi	1	795.574.000.000	800	PMDN
10	Jasa Rekreasi	1	500.000.000	15	PMA
11	Pendidikan / Ketrampilan	1	200.000.000	10	
	Jumlah	15	1.071.113.176.344	3.674	
	PMA	12	44.402.930.137	1.771	
	PMDN	3	1.026.710.246.207	1.903	

Sumber: Klaten Dalam Angka, 2010

e. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Klaten Tahun 2006 - 2010 diperlukan Kebijakan Umum yang akan menjadi panduan dalam melakukan langkah kerja berupa program - program pembangunan dan kegiatan. Kebijakan yang harus dijadikan acuan meliputi:

- 1) Meningkatkan keamanan, ketertiban dan kebersamaan untuk menciptakan masyarakat Klaten yang aman, rukun dan damai.
- 2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga tumbuh kesadaran partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Membangun masyarakat Kabupaten Klaten yang adil dan demokratis
- 4) Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik; bersih, berwibawa, efektif dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 5) Melaksanakan penegakan hukum dan hak asasi manusia.

commit to user

- 6) Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah.
- 7) Membangun sistem politik daerah yang kokoh melalui peningkatan kinerja legislatif dan peningkatan peran organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta menumbuhkan kesadaran politik masyarakat.
- 8) Menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- 9) Membangun masyarakat Kabupaten Klaten yang berbudaya dan berbudi luhur didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

f. Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mencapai tujuan dari sasaran pembangunan daerah yang tercermin dalam Visi Pembangunan daerah Kabupaten Klaten, maka strategi pembangunan diarahkan pada:

- 1) Penanganan masalah – masalah yang belum terselesaikan.
- 2) Penyelesaian masalah–masalah yang mendesak meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat; pengentasan kemiskinan; pengentasan pengangguran; pendidikan dan kesehatan.
- 3) Pemberdayaan potensi unggulan dan akses pasar unggulan pertanian, industri dan UKM serta perdagangan jasa.
- 4) Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

- 5) Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial dasar.
- 6) Pendampingan program – program pembangunan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, Luar Negeri dan Kemitraan.
- 7) Penanggulangan bencana alam dan masalah sosial lainnya.
- 8) Pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
- 9) Pemberian bantuan stimulan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat dengan orientasi pada peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- 10) Mendukung stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, pengalihan hukum dan hak asasi masyarakat.
- 11) Mendukung upaya – upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah.
- 12) Upaya peningkatan daya saing daerah yang bertumpu pada karakteristik produk lokal.
- 13) Pengembangan kawasan – kawasan potensial seperti kawasan industri, perusahaan dan pemukiman kawasan pariwisata dan lain – lain

B. Analisis Data

1. Deskripsi Variabel Penelitian

- a. Variabel Dana Perimbangan.

Kondisi dana perimbangan Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.23
Jumlah Dana Perimbangan di Kabupaten Klaten
Tahun 2005 – 2009

No	Dana Perimbangan	Jumlah (Rp)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Bagi Hasil Pajak	14.524.723.000	16.648.643.000	19.632.588.000	27.215.857.000	49.345.650.000
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	823.458.000	923.151.000	923.151.000	478.280.000	625.348.000
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	354.589.000.000	382.345.000.000	404.869.000.000	635.488.000.000	753.612.000.000
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	8.750.000.000	10.030.000.000	11.900.000.000	27.530.000.000	52.468.000.000
	Jumlah	378.687.000.000	409.946.794.000	437.324.739.000	690.712.137.000	856.051.000.000

Sumber: DPPKAD Kabupaten Klaten, 2010.

Tabel 4.24
Statistik Deskriptif Variabel Dana Perimbangan di Kabupaten Klaten
Tahun 2005 – 2009

		Dana Perimbangan
N	Valid	5
	Missing	0
Mean		555.000.000.000
Median		437.000.000.000
Minimum		400.000.000.000
Maximum		900.000.000.000
Sum		3.000.000.000.000

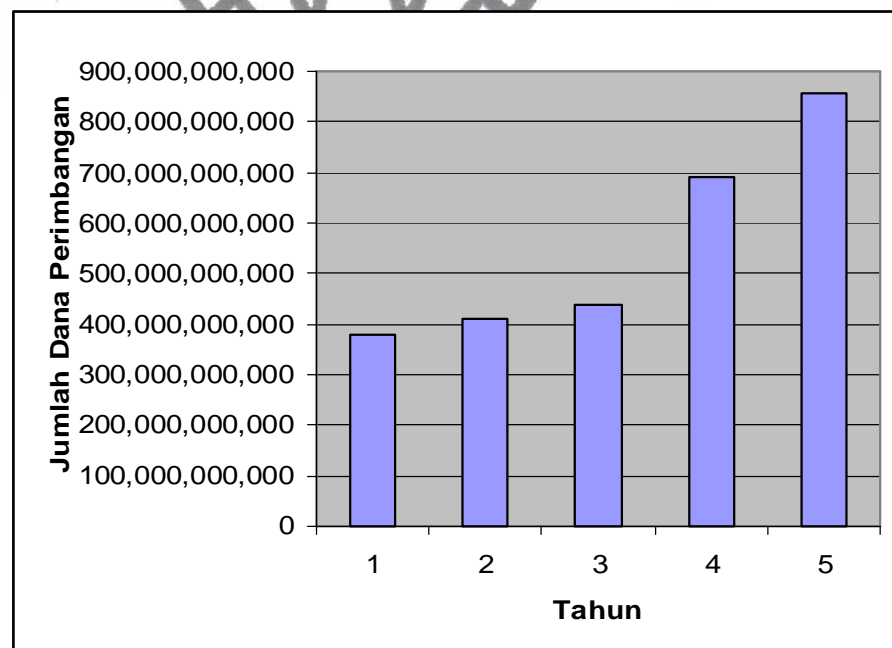
Sumber: Data diolah

Dana Perimbangan tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami peningkatan secara berkala. Ini menunjukkan adanya dinamika pembangunan di Kabupaten Klaten yang baik dan dapat meningkatkan kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Klaten. Kesenjangan penerimaan dari dana perimbangan (DBH, DAU, DAK)

ini paling tidak memberikan indikasi adanya ketimpangan fiskal yang tidak terlalu tinggi.

Salah satu fungsi dana perimbangan adalah untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada, sehingga distribusi dana perimbangan kepada daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh dana perimbangan yang relatif besar. Meskipun demikian tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan masih tinggi dalam pembiayaan rumah tangganya.

Data di atas dapat digambarkan dalam bentuk histogram seperti dibawah ini:



Gambar 4.1. Histogram variabel Dana Perimbangan

b. Variabel Lain-lain Penerimaan yang Sah

Selain dana perimbangan, sumber pendapatan daerah berasal juga dari lain-lain penerimaan yang sah. Kondisi lain-lain penerimaan yang sah di Kabupaten Klaten disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.25
Lain-lain Penerimaan yang Sah Kabupaten Klaten
Tahun 2005 – 2009

No	Penerimaan	Jumlah (Rp)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pemerintah	11.543.050.000	20.929.042.000	19.059.655.000	30.054.896.000	45.528.625.000
2.	Lain-lain	25.892.253.000	22.824.108.000	30.905.000.000	25.000.000.000	35.423.000.000
	Jumlah	37.435.303.000	43.753.150.000	49.964.655.000	55.054.896.000	80.951.625.000

Sumber: DPPKAD Kabupaten Klaten, 2010.

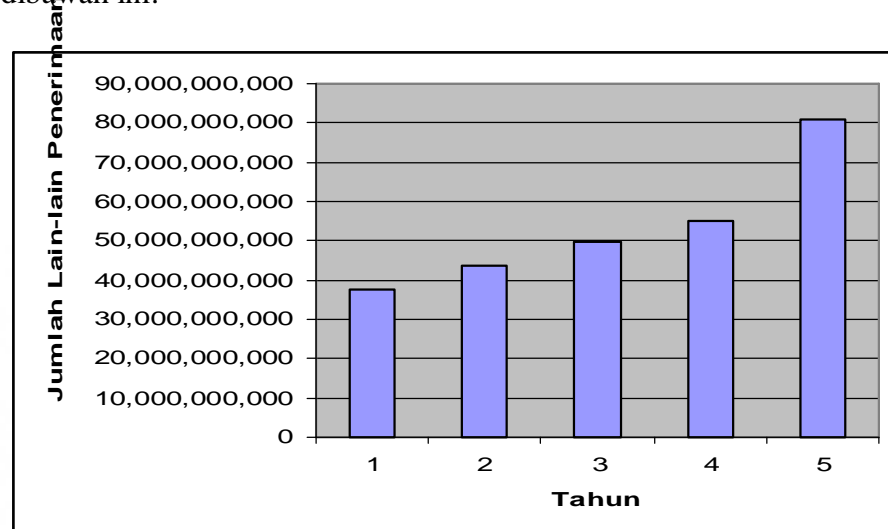
Tabel 4.26
Statistik Deskriptif Variabel Lain-Lain Penerimaan yang Sah
di Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2009

		Lain-Lain Penerimaan yang Sah
N	Valid	5
	Missing	0
Mean		53.400.000.000
Median		49.700.000.000
Minimum		37.435.303.000
Maximum		80.951.625.000
Sum		300.000.000.000

Sumber: Data diolah

Lain-lain pendapatan yang merupakan sumber pendapatan daerah selain dari PAD, dana perimbangan dan pembiayaan, dari tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami fluktuasi. Permasalahan ini dikarenakan pendapatan dari kelompok ini bersifat tidak tentu atau lebih bersifat insidental dan sangat tergantung pada kondisi ekonomi dan keuangan negara dan daerah.

Data di atas dapat digambarkan dalam bentuk histogram seperti dibawah ini:



Gambar 4.2. Histogram variabel Lain-lain Penerimaan yang Sah

c. Variabel Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten tahun 2005-2009 menunjukkan arah yang positif. Hal ini dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten selalu menunjukkan kenaikan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.27
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten
Tahun 2005 – 2009

No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pajak Daerah	9.255.000.000	10.015.000.000	11.115.000.000	12.955.000.000	13.125.000.000
2.	Retribusi Daerah	7.895.562.000	9.032.237.000	10.913.210.000	11.014.894.000	13.215.652.000
3.	Bagian Laba Usaha Daerah	1.023.000.000	1.291.000.000	4.502.000.000	3.389.494.000	4.658.752.000
4.	Lain-lain PAD yang Sah	4.567.923.000	5.487.362.000	6.936.500.000	8.912.400.000	10.025.520.000
	Jumlah	22.741.485.000	25.825.599.000	33.466.710.000	36.271.788.000	41.024.924.000

Sumber: DPPKAD Kabupaten Klaten, 2010.

Tabel 4.28
Statistik Deskriptif Variabel Pendapatan Asli Daerah

di Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2009

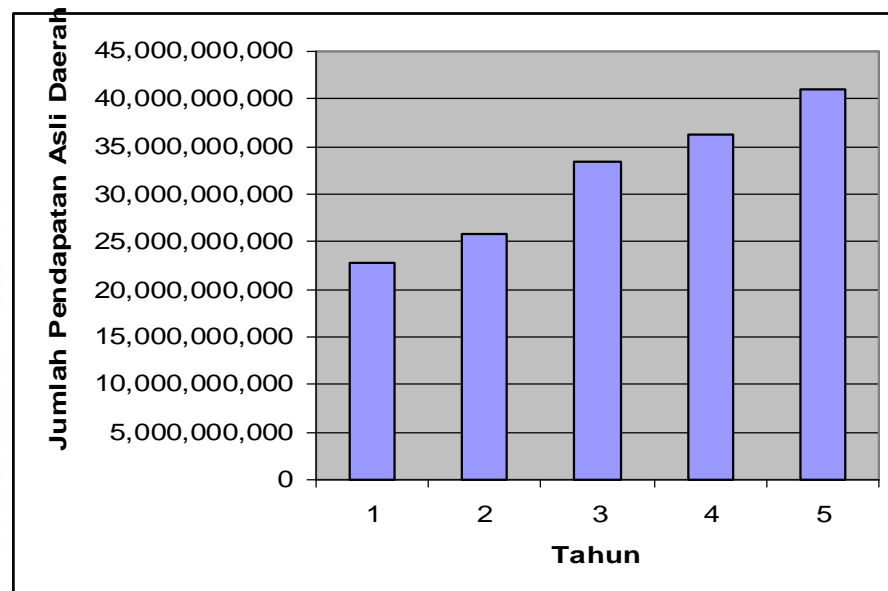
		Pendapatan Asli Daerah
N	Valid	5
	Missing	0
Mean		31.900.000.000
Median		33.500.000.000
Minimum		22.741.485.000
Maximum		41.024.924.000
Sum		200.000.000.000

Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan rata-rata Pendapatan Asli Daerah, yaitu pada tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten mempunyai potensi yang dapat meningkatkan penerimaan dari sisi PAD dalam arti disparitas penerimaan PAD masih sangat besar. Peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditingkatkan karena memberi kontribusi yang sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penggalan dari sumber ini harus mendapat perhatian khusus guna meningkatkan PAD dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Klaten.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Hal ini dikarenakan PAD masih relatif rendah yaitu sekitar 5 % (kontribusi PAD terhadap APBD), sehingga tingkat kemandirian daerah sangat

rendah. Data di atas dapat digambarkan dalam bentuk histogram seperti dibawah ini:



Gambar 4.3. Histogram variabel Pendapatan Asli Daerah

d. Variabel Belanja Pembangunan

Belanja Pembangunan Kabupaten Klaten merupakan susunan keadaan pengeluaran di sektor keuangan daerah. Belanja pembangunan di Kabupaten Klaten mengalami kenaikan pada tiap tahunnya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.29
Belanja Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2009

No	Belanja Pembangunan	Jumlah (Rp)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Belanja Penunjang	150.234.541.000	176.504.721.000	194.232.000.000	395.263.000.000	405.238.000.000
2	Belanja Modal	45.232.690.000	28.743.730.000	49.534.717.000	91.768.055.000	95.997.267.000
	Jumlah	195.467.231.000	205.248.451.000	243.766.379.000	487.030.950.000	501.235.476.000

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, 2010.

Tabel 4.30
Statistik Deskriptif Variabel Belanja Pembangunan
di Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2009

commit to user

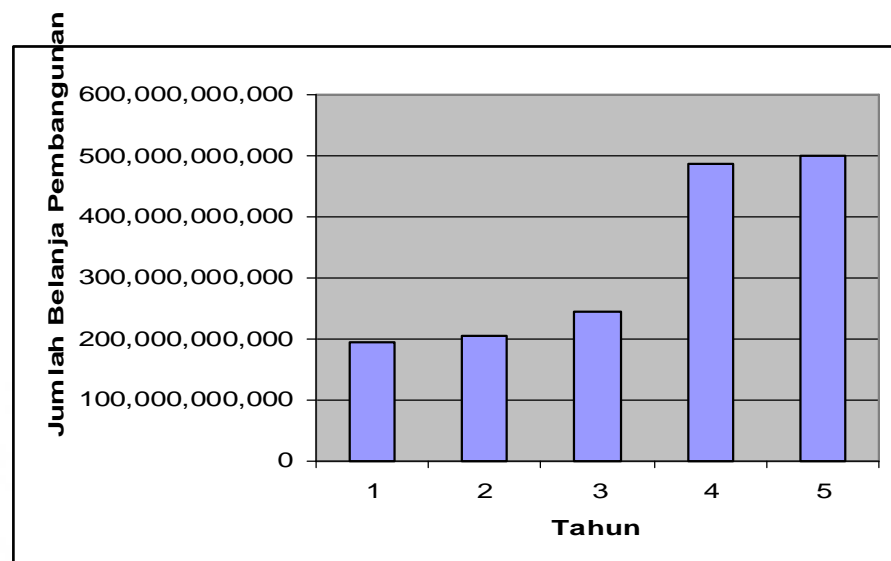
		Belanja Pembangunan
N	Valid	5
	Missing	0
Mean		327.000.000.000
Median		244.000.000.000
Minimum		200.000.000.000
Maximum		500.000.000.000
Sum		2.000.000.000.000

Sumber: Data diolah

Tabel diatas dapat dilihat bahwa, belanja pembangunan daerah baik belanja penunjang yang terdiri dari belanja penunjang gaji upah, belanja penunjang bahan, belanja penunjang perjalanan, dan belanja penunjang lain-lain; maupun belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jaringan (jalan, irigasi dan lain-lain), belanja modal fisik, dan belanja modal non fisik dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Kondisi ini menandakan bahwa kebutuhan Kabupaten Klaten semakin meningkat dari tahun ke tahun. Masalah bagi Kabupaten Klaten karena ketidakseimbangan jumlah pemasukan (pendapatan) dengan pengeluaran (belanja). Kondisi di atas berlanjut, maka Kabupaten Klaten akan mengalami defisit pada tahun-tahun yang akan datang.

Data di atas dapat digambarkan dalam bentuk histogram seperti dibawah ini:



Gambar 4.4. Histogram variabel Belanja Pembangunan

2. Analisis Korelasi Product Moment

Teknik korelasi ini digunakan untuk menguji hubungan secara parsial antara variabel X dengan variabel Y. Dasar pengambilan keputusan adalah:

Tabel 4.31
Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiono, 2010: 231

Untuk mempercepat perhitungan di dalam menganalisis data, maka dipergunakan bantuan komputer program *SPSS*. Hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

commit to user

a. Pengujian hipotesis pertama.

Hipotesis yang diajukan adalah:

H_1 = Dana perimbangan memiliki hubungan positif sangat kuat dengan belanja pembangunan.

Hasil analisis dengan korelasi *product moment* dari Pearson diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.32
Hasil Uji Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Pembangunan

		Dana Perimbangan	Belanja Pembangunan
Dana Perimbangan	Pearson Correlation	1	.968**
	Sig. (2-tailed)		.007
	N	5	5
Belanja Pembangunan	Pearson Correlation	.968**	1
	Sig. (2-tailed)	.007	
	N	5	5

Sumber: Data diolah

Data di atas menunjukkan bahwa nilai r yang diperoleh sebesar 0,968 atau nilai r semakin mendekati angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara variabel dana perimbangan dengan belanja pembangunan.

b. Pengujian hipotesis kedua

Hipotesis yang diajukan adalah:

H_2 = Lain-lain penerimaan yang sah memiliki hubungan positif sangat kuat dengan belanja pembangunan.

commit to user

Hasil analisis dengan korelasi *product moment* dari Pearson diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.33
Hasil Uji Hubungan Lain-lain Penerimaan yang Sah dengan Belanja Pembangunan

		Lain-lain Penerimaan yang Sah	Belanja Pembangunan
Lain-lain Penerimaan yang Sah	Pearson Correlation	1	.837
	Sig. (2-tailed)		.077
	N	5	5
Belanja Pembangunan	Pearson Correlation	.837	1
	Sig. (2-tailed)	.077	
	N	5	5

Sumber: Data diolah

Data di atas menunjukkan bahwa nilai r yang diperoleh sebesar 0,837 atau nilai r semakin mendekati angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara variabel lain-lain penerimaan yang sah dengan belanja pembangunan.

c. Pengujian hipotesis ketiga

Hipotesis yang diajukan adalah:

H_3 = Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan positif sangat kuat dengan belanja pembangunan.

Hasil analisis dengan korelasi *product moment* dari Pearson diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.34
Hasil Uji Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Pembangunan

commit to user

		Pendapatan Asli Daerah	Belanja Pembangunan
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	1	.886*
	Sig. (2-tailed)		.045
	N	5	5
Belanja Pembangunan	Pearson Correlation	.886*	1
	Sig. (2-tailed)	.045	
	N	5	5

Sumber: Data diolah

Data di atas menunjukkan bahwa nilai r yang diperoleh sebesar 0,886 atau nilai r semakin mendekati angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara variabel pendapatan asli daerah dengan belanja pembangunan.

C. Pembahasan/Interpretasi Ekonomi

Penelitian ini meliputi desentralisasi fiskal yang terdiri dari variabel dana perimbangan, lain-lain penerimaan yang sah, dan pendapatan asli daerah, serta belanja pembangunan. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka unsur-unsur yang dianalisis sebagai berikut :

1. Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Pembangunan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai r yang diperoleh sebesar 0,968 atau nilai r semakin mendekati angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara dana perimbangan dengan belanja pembangunan.

commit to user

Belanja pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dengan sarana dan prasarana atau pembangunan fisik dan non fisik. Selanjutnya apabila belanja pembangunan telah dilimpahkan dan pembiayaan juga telah dilimpahkan (DAU/DAK) maka sarana dan prasarana fisik maupun non fisik sangat diperlukan agar mampu memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat daerah.

Penataan dan pemantapan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Klaten adalah adanya desentralisasi dan Otonomi Daerah. Dengan diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka daerah diberikan kewenangan dalam menggali sendiri sumber-sumber keuangannya agar lebih mandiri. Dengan pola pembagian keuangan antara Pusat dan Daerah, dimana perolehan PAD dan pajak-pajak lainnya masuk ke Pusat sebesar 10 persen dan kembali ke daerah sebesar 90 persen.

Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat maka daerah

bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja pembangunan yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

Desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga kapasitas masyarakat akan meningkat, dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memiliki kontribusi dalam meningkatkan kemandirian daerah. Diyakini konsep Otonomi Daerah akan mampu mendorong tumbuhnya perkonomian dengan mengolah sumberdaya daerah untuk menjadi kekuatan ekonomi baru melalui kemampuan daerah itu sendiri dalam mengolah sumberdaya yang ada, sehingga diharapkan memiliki *multiplayer effect positive* dalam membentuk kemandirian daerah dan sosial ekonomi masyarakat.

Peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong pula peningkatan kesempatan masyarakat yang selanjutnya akan pula memberikan peluang yang besar terhadap peningkatan kualitas fisik dan non fisik penduduk. Perkembangan kesempatan masyarakat akan menyokong terciptanya kemajuan sektor andalan yang selanjutnya mendorong terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan potensi penyelenggaraan Otonomi Daerah.

2. Hubungan Lain-lain Penerimaan yang Sah dengan Belanja Pembangunan

commit to user

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai r yang diperoleh sebesar 0,837 atau nilai r semakin mendekati angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara variabel lain-lain penerimaan yang sah dengan belanja pembangunan. Dibandingkan dengan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, lain-lain penerimaan yang sah memiliki hubungan yang paling kecil dengan belanja pembangunan daerah Kabupaten Klaten.

Kondisi di atas disebabkan oleh belum optimalnya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan otonomi daerah yakni dalam upaya menggali dan meningkatkan penerimaan keuangan. Potensi daerah Kabupaten Klaten masih banyak yang belum tergarap dengan baik, sehingga masih sangat tergantung pada keuangan pemerintah pusat. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: kemampuan aparatur dibidang perpajakan (*tax profesionalism*) masih sangat tergantung pada kreatifitas aparatur pemerintah daerah untuk mampu mengkoordinasi lembaga-lembaga penghasil sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, sedangkan kreatifitas aparatur sangat dipengaruhi oleh kualitas aparturnya; adanya intervensi pemerintah pusat yang tercermin pada waktu implementasi kebijakan; pengelolaan BUMD yang kurang profesional; masih adanya lembaga-lembaga dekonsentrasi di Kabupaten Klaten sehingga sering kali juga membatasi kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penggalian sumber-sumber keuangan secara optimal; serta kurangnya sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten.

3. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Pembangunan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai r yang diperoleh sebesar 0,886 atau nilai r semakin mendekati angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara pendapatan asli daerah dengan belanja pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Klaten harus berperan sebagai *engine of growth* bagi kemajuan daerahnya untuk meningkatkan penerimaan PAD. Peran tersebut akan tercermin dalam pendayagunaan kemampuan mengelola keuangan daerah serta sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi. Semakin maju pembangunan di Kabupaten Klaten, maka pemerintah kabupaten memerlukan sumber dana yang lebih besar.

Potensi kemampuan pemerintah Kabupaten Klaten tercermin dari semakin tingginya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah harus dikembangkan dengan mendorong kreativitas aparatur pemerintah daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan secara adil dan proporsional.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap

pengalokasian anggaran belanja pembangunan oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja pembangunan) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

Berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 (direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004) memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat mengembangkan sumber daya sendiri dan dapat mengurangi ketergantungan dari Pusat (Bahl, 1999; World Bank, 2003). Strategi pengalokasian belanja pembangunan oleh pemerintah daerah sangat ditentukan pada kepentingan dan kebutuhan daerah, sehingga pemerintah daerah harus sangat hati-hati dan proporsional dalam pengalokasiannya. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005).

Dana perimbangan memiliki hubungan yang paling kuat dengan belanja pembangunan di bandingkan dengan komponen lainnya. Isdijoso dan Wibowo (2002) menyatakan bahwa pada awal penerapan desentralisasi fiskal dana perimbangan yaitu DAU banyak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran rutin terutama untuk belanja pegawai sebagai dampak pengalihan status pegawai pusat menjadi pegawai pemda (prinsip *money follow function* juga harus disertai dengan penguatan kapasitas sumber daya manusianya yang akan mengelola keuangan daerah).

Kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten masih relatif kecil yang menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi PAD belum optimal dan diperkirakan masih di bawah potensi yang ada, karena pertumbuhan PAD yang relatif tidak konstan. Identifikasi rendahnya penerimaan PAD di Kabupaten Klaten disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

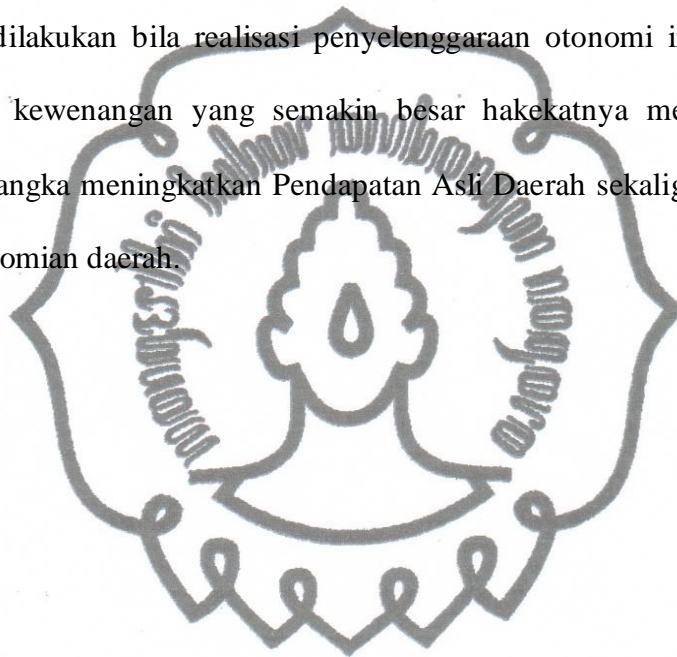
- a. Belum adanya peraturan daerah yang memadai tentang pajak dan retribusi daerah;
- b. Struktur dan jenis pajak serta retribusi daerah yang kurang berkembang;

- c. Kurang berperannya perusahaan daerah;
- d. Kelembagaan dan sumber daya manusia yang terbatas, yang berkaitan dengan kapasitas administratif;
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya;
- f. Tidak memiliki data base tentang pajak dan retribusi daerah; dan
- g. Kelemahan dalam pemberian subsidi.

Berbagai upaya dan kendala yang telah disebutkan di atas perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut hemat peneliti peninjauan terhadap Peraturan Daerah baik yang ada maupun yang belum ada perlu segera ditetapkan kembali dengan melihat situasi dan kondisi sehingga berbagai upaya dan kendala yang telah disebutkan di atas merupakan peninjauan terhadap peraturan daerah yang ada, sehingga peluang yang sangat terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam peninjauan tersebut terutama dapat dilaksanakan penyesuaian besaran tarif yang ada dan yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi daerah dan penyesuaian peraturan daerah tersebut juga dilakukan melalui terobosan pengembangan potensi.

Dengan demikian, diperlukan adanya “*goodwill*” dari Pemerintah Pusat untuk lebih memberdayakan daerah dalam mengaplikasikan konsep desentralisasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, didukung pula dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberi kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensinya. *commit to user*

Sejak dicanangkannya era otonomi yang diperluas dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kabupaten Klaten sebagai titik sentral ekonomi diharapkan semakin berarti, oleh karena itu kebijakan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan bila realisasi penyelenggaraan otonomi ingin diwujudkan. Dengan kewenangan yang semakin besar hakekatnya merupakan peluang dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara dana perimbangan dengan belanja pembangunan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi *product moment* (r) yang diperoleh sebesar 0,968 atau nilai r memiliki koefisien interval 0,80 – 1,000.
2. Terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara lain-lain penerimaan yang sah dengan belanja pembangunan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi *product moment* (r) yang diperoleh sebesar 0,837 atau nilai r memiliki koefisien interval 0,80 – 1,000.
3. Terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara pendapatan asli daerah dengan belanja pembangunan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi *product moment* (r) yang diperoleh sebesar 0,886 atau nilai r memiliki koefisien interval 0,80 – 1,000.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada:

commit to user

1. Transfer pemerintah pusat tidak hanya digunakan untuk membiayai belanja rutin daerah, tetapi juga untuk mendukung belanja pembangunan dengan melakukan alokasi perencanaan, penganggaran dan pemilihan proyek-proyek investasi publik yang sesuai dengan kondisi daerah sehingga standar pelayanan publik dapat dioptimalkan yang ditujukan kepada masyarakat.
2. Menerapkan asas transparansi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang ditetapkan Pemerintah, untuk menekan potensi penyimpangan dan penggelapan sumber-sumber pendapatan daerah, supaya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan secara efektif dan efisien.
3. Pengembangan pemungutan PAD melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah dan lain-lain pendapatan cukup potensial melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai sumber pembiayaan pembangunan mengingat potensi sumber daya yang dimiliki masih cukup potensial untuk dikembangkan.